

**ANALISIS KOMPARASI FAKTOR PENDIDIKAN,  
KESEHATAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER  
SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN  
METODE BARU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Prodi Ekonomi Syari'ah



Oleh:  
**Mohammad Zyainullah**  
NIM. E20152077

Dosen Pembimbing:  
**Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M. MT.**  
NIP. 197810032015032001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2019**

**ANALISIS KOMPARASI FAKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN  
DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI KABUPATEN JEMBER SEBELUM DAN  
SESUDAH MENGGUNAKAN METODE BARU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

**Mohammad Zyainullah**  
NIM: E20152077

**Disetujui Pembimbing:**

  
**Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M. MT.**  
NIP. 197810032015032001



## MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ  
وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ<sup>1</sup>

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 13:11.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup penulis dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya, yaitu:

1. Bapak Mustakim dan Ibu Siti Romlah dan semua keluarga saya yang telah mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. KH. Ach. Muzakki Syah dan Ibu Nyai Hj. Halimah dan segenap keluarga besar PP. Al-Qodiri 1 Jember yang senantiasa mendoakan dan dukungan spiritual.
3. Keluarga besar pengurus putra PP. Al-Qodiri 1 Jember yang selalu mendukung saya.
4. Keluarga besar kelas Ekonomi Syariah 2 IAIN Jember yang telah mendukung dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015 terima kasih suka duka yang telah kita lalui semasa perkuliahan dan terima kasih kebahagiaan yang akan selalu terkenang.

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

Mohammad Zyainullah, 2019: *Analisis Komparasi Faktor Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Metode Baru* .

Pembangunan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh suatu negara secara terus menerus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan suatu negara agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu tolak ukur pembangunan yang tidak hanya fokus pada ekonomi, namun pada sektor kesejahteraan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru? 2) Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru? 3) Apakah ada perbedaan signifikan variabel IPM, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru?.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Selanjutnya untuk mengetahui ada atau tidak ada perbedaan variabel IPM, pendidikan, kesehatan, kemiskinan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian sekunder dengan menggunakan data *time series*. Jenis subjek penelitian dari penelitian ini adalah makro subjek. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang dipilih yakni dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, uji T, uji normalitas dan uji beda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan secara parsial (uji T). Sedangkan untuk uji F (simultan) menunjukkan bahwa variabel pendidikan, kesehatan dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam uji beda hanya variabel indikator RLS yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

**Kata Kunci: IPM, Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan**



## ABSTRACT

Mohammad Zyainullah, 2019: *Comparative Analysis of Education, Health and Poverty Factors Against the Human Development Index in Jember Regency Before and After Using the New Method.*

Development is one of the processes carried out by a country continuously for the welfare of the people. Development is an absolute requirement that must be done by a country so that its benefits can be felt in the long run. Human Development Index (HDI) as one of the development benchmarks that not only focus on the economy, but on the social welfare sector such as education and health.

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) Are there a significant influence partially on education, health and poverty factors on HDI before and after using new methods? 2) Are there simultaneously significant effects on education, health and poverty factors on HDI before and after using new methods? 3) Are there significant differences in the HDI, education, health and poverty variables before and after using the new method ?.

The research objective is to determine the effect of partially or simultaneously factors of education, health and poverty on HDI before and after using new methods. Furthermore, to find out whether or not there are differences in the HDI variables, education, health, poverty before and after using a new method.

To identify these problems, this study uses a quantitative approach. The type of research used is secondary research using time series data. The type of research subject of this research is the subject macro. The data collection techniques and instruments chosen were documentation. Analysis of the data used is the coefficient of determination ( $R^2$ ), F test, T test, normality test and difference test.

The results of this study indicate that there are several variables that have no significant effect partially (T test). As for the F test (simultaneous) shows that the variables of education, health and poverty have a significant effect on HDI. In the difference test, only RLS indicator variables did not show significant differences before and after using the new method.

**Keywords: HDI, Education, Health, Poverty**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya karena adanya islam dan iman.

Skripsi yang berjudul “Analisis Komparasi Faktor Pendidikan, Kesehatan, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jember Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Metode Baru” ini disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Strata-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember yang telah melindungi, mengayomi, dan menyediakan fasilitas pendidikan.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'I, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.



3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
4. Ibu Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M. MT. selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
6. Ibu Ir. Indriya Purwaningsih, MT. Selaku pempinan BPS Kabupaten Jember yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.
7. Segenap keluarga besar kelas Ekonomi Syariah 2 IAIN Jember yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar pengurus putra PP Al-Qodiri yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman dan orang peduli dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini. Semoga amal baik yang telah saudara/i lakukan menjadikan amal yang diterima Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 19 Januari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1. Variabel Penelitian .....	12
2. Indikator Penelitian .....	13
F. Definisi Operasional.....	14
G. Asumsi Penelitian.....	18
H. Hipotesis.....	18
I. Metode Penelitian .....	21

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
2. Subjek Penelitian.....	23
3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	24
a. Uji Statistik .....	25
1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	25
2) Uji F .....	25
3) Uji T .....	25
b. Uji Komparatif .....	26
1) Uji Normalitas.....	26
2) Uji <i>Paired T Test</i> .....	27
J. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>29</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	29
B. Kajian Teori.....	44
1. Ilmu Ekonomi Pembangunan.....	44
2. Konsep Pembangunan.....	47
3. Pembangunan Manusia .....	50
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	56
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	72
1. Kabupaten Jember .....	72
a. Sejarah.....	72

b. Pendidikan.....	74
c. Ekonomi .....	75
2. IPM.....	77
a. IPM.....	77
b. Indeks Pendidikan .....	79
c. Indeks Kesehatan .....	81
d. Indeks Kemiskinan.....	82
B. Penyajian Data.....	84
1. Perhitungan Menggunakan Metode Lama .....	84
2. Perhitungan Menggunakan Metode Baru.....	85
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	85
1. Uji Statistik .....	85
2. Uji Komparatif .....	92
D. Pembahasan.....	99
<b>BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran-saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
2. Data Penelitian	
3. Data Output SPSS	
4. Jurnal Penelitian	



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur periode tahun 2001-2009 Metode Lama .....	6
1.2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur periode tahun 2010-2018 Metode Baru.....	8
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	41
1.1	Data IPM Metode Lama.....	84
1.2	Data IPM Metode Baru .....	85
1.3	Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) IPM Metode Lama.....	86
1.4	Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) IPM Metode Baru .....	87
1.5	Hasil Uji F IPM Metode Lama .....	88
1.6	Hasil Uji F IPM Metode Baru.....	88
1.7	Hasil Uji T IPM Metode Lama .....	89
1.8	Hasil Uji T IPM Metode Baru.....	91
1.9	Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov IPM Metode Baru .....	93
1.10	Hasil Uji Paired T Test IPM Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru .....	94
1.11	Hasil Uji Paired T Test AHH Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru .....	95
1.12	Hasil Uji Paired T Test RLS Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru .....	96
1.13	Hasil Uji Paired T Test Melek Huruf	



Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru .....	97
<b>1.14 Hasil Uji Paired T Test Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan</b>	
Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru .....	98



## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1.1	Kerangka Pemikiran.....	20
3.1	IPM Sebelum dan Sesudah Metode Baru .....	110
3.2	AHH Sebelum dan Sesudah Metode Baru .....	112
3.3	RLS Sebelum dan Sesudah Metode Baru .....	114
3.4	Melek Huruf Sebelum dan Sesudah Metode Baru.....	116
3.5	Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan Sebelum dan Sesudah Metode Baru.....	118



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh suatu negara secara terus menerus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan suatu negara agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sebagai salah satu program dari suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan harus dibuatkan konsep sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud dengan baik.

Salah satu yang menjadi tolok ukur dalam pembangunan suatu negara dalam keadaan baik maupun tidak yakni pembangunan sumber daya manusia yang dimiliki negara tersebut. Sebagai salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh negara maka pembangunan sumber manusia yang mencakup peningkatan kapasitas dasar penduduk harus dikelola dengan baik yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Todaro, kapasitas dasar meliputi tiga nilai pokok keberhasilan dari pembangunan nasional adalah kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*).<sup>1</sup>

Pada awalnya, pembangunan merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah dan negara, dan masyarakat hanya sebagai objek dari pembangunan tersebut. Belakangan ini, perspektif seperti itu mulai berubah

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, terj. Agus Dharma (Jakarta, Erlangga, 2011), 25.

dan mengalami perkembangan, tidak hanya bertumpu pada pemerintah sebagai pelaku pembangunan, namun masyarakat mulai diikutsertakan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran dari pembangunan tersebut.

Sebagai salah satu indikator kesejahteraan, suatu pembangunan memiliki tujuan akhir yang tidak hanya menghitung pendapatan per kapita penduduk yang selama ini perhitungan tersebut dinilai masih kurang akurat untuk mengukur kesuksesan pembangunan nasional. Perhitungan pendapatan per kapita dinilai tidak fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri melainkan pembangunan ekonomi.<sup>2</sup> Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan. Jadi pembangunan bukan hanya terletak pada aspek ekonomi, namun pada aspek sosial juga.<sup>3</sup> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu alat ukur untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia baik dalam segi ekonomi maupun sosial dapat dilakukan. IPM ini lebih mengedepankan hal-hal yang lebih sensitif dan lebih mendetail sehingga dianggap lebih efektif daripada perhitungan pendapatan per kapita yang selama ini digunakan oleh sebuah negara.

Ada beberapa alasan yang menjadikan dasar mengapa pembangunan SDM perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. **Pertama**, terdapat banyak negara berkembang di dunia termasuk Indonesia yang berhasil dalam pembangunan ekonomi namun gagal dalam

---

<sup>2</sup> Nadia Ayu Bhakti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4 (Desember, 2014), 453.

<sup>3</sup> Irfan Sauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 30.

mengurangi kesenjangan sosial. Artinya yang kaya semakin kaya yang miskin tetap miskin. **Kedua**, banyak negara maju dalam perekonomian yang mempunyai masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi namun tidak dapat menanggulangi masalah sosial yang dihadapi seperti halnya pengangguran. **Ketiga**, beberapa negara yang tergolong negara yang memiliki pendapatan yang rendah namun mampu mencapai tingkat pembangunan SDM yang tinggi karena memiliki kebijakan yang mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada secara optimal dalam mengembangkan potensi kemampuan dasar manusia.<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pembangunan nasional membutuhkan SDM yang berkualitas sebagai modal utama dari pembangunan tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana sebagai investasi yang nantinya akan sangat membantu dalam membangun SDM yang berkualitas yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Menurut Mankiw, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Investasi terhadap SDM diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat dilihat melalui berbagai macam aspek utama seperti, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kemiskinan. Sehingga

---

<sup>4</sup> Nadia Ayu Bhakti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 2008-2012", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4 (Desember, 2014), 453.

kebijakan pemerintah yang efektif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas SDM.<sup>5</sup>

Dalam hal ini investasi modal manusia dapat mengacu pada seberapa besar keberpihakan pemerintah dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan gambaran suatu pembangunan nasional dari segi sosial yang menjadi tujuan dasar dari pembangunan suatu daerah. Meier dan Rauch mengatakan bahwa pendidikan sebagai modal utama manusia agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan jangka panjang yang menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat. Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan kesehatan merupakan inti dari beberapa hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.<sup>6</sup> Kesehatan menjadi gambaran seberapa sukses suatu negara dalam mengayomi rakyatnya agar selalu hidup sehat sehingga dibutuhkan program yang efektif untuk mengelola kesehatan tersebut.

Selain dua hal tersebut, pengeluaran rumah tangga masyarakat sebagai faktor dari aspek kemiskinan memegang peranan penting dalam

---

<sup>5</sup> Christina Usmaliadanti, "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009", (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 18.

<sup>6</sup> Ibid., 19 .

pembangunan manusia di suatu daerah, dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia. Pengeluaran rumah tangga digambarkan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan saja dibandingkan dengan penduduk yang lebih kaya. Akibatnya penduduk yang tergolong miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang memadai jika hanya mengandalkan pendapatan yang hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Untuk itu, perlunya adanya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak.<sup>7</sup>

Kemiskinan akan menghambat masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang baik serta menikmati pelayanan kesehatan. Dari sudut pandang seperti itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak berkualitas atau memiliki tingkat produktivitas sehingga dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara. Hal ini berimbas pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia pada tahun 2017 pada angka 71,39 atau lebih baik daripada tahun sebelumnya yakni 70,81 atau naik sebesar 0,5. Angka tersebut dapat dihitung dari tiga indikator utama IPM, yakni angka harapan hidup (kesehatan), rata-rata lama sekolah dan

---

<sup>7</sup> Christina Usmaliadanti, "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009", (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 19.



harapan lama sekolah (pendidikan) dan pengeluaran per kapita (kemiskinan). Ketiga indikator tersebut mengalami peningkatan. Untuk angka harapan hidup, kini bayi mengalami angka harapan hidup berkisar 71,2 atau naik dari tahun sebelumnya yakni 71,06. Sementara itu angka lama sekolah juga meningkat 8,17 tahun bagi setiap warga negara atau membaik dari kondisi sebelumnya yakni pada angka 8,1 tahun. Sedangkan konsumsi masyarakat juga meningkat yang tergambar dalam pengeluaran per kapita yang disesuaikan yakni Rp 11,059 juta atau membaik dari tahun sebelumnya yakni Rp 10,664.<sup>8</sup>

Posisi negara Indonesia dalam IPM merupakan akumulasi dari berbagai provinsi maupun kota/kabupaten yang ada. Tabel 1.1 menunjukkan IPM Provinsi Jawa Timur dengan perhitungan yang menggunakan metode lama:

**Tabel 1.1**  
**IPM Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2009**  
**Metode Lama**

Kabupaten/ Kota	IPM Dengan Metode Lama								
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	66,85	68,42	69,18	69,78	70,38	69,78
Kabupaten Pacitan	61,14	65,7	62,94	67,59	68,09	69,78	70,48	70,91	70,48
Kabupaten Ponorogo	64,13	62,6	66,16	65,65	66,45	67,13	68,55	69,07	68,55
Kabupaten Trenggalek	63,67	68,2	65,01	69,42	70,18	71,22	71,68	72,15	71,68
Kabupaten Tulungagung	67,28	67,6	68,29	69,93	70,48	70,7	72	72,45	72
Kabupaten Blitar	64,79	67,4	66,17	69,45	70,33	72,05	72,28	72,74	72,28
Kabupaten Kediri	66,24	66,1	67,29	68,15	68,67	69,34	70,39	70,85	70,39
Kabupaten Malang	63,47	65,2	64,71	66,44	66,92	68,39	69,07	69,55	69,07

<sup>8</sup> BPS (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2017*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS)).

Kabupaten Lumajang	59,62	61,4	61,31	64,02	64,5	65,9	66,2	66,65	66,2
Kabupaten Jember	59,94	58,1	61,31	60,9	61,72	63,04	63,27	63,71	63,27
Kabupaten Banyuwangi	64,54	62,6	66,12	65,35	66,02	66,8	67,24	67,8	67,4
Kabupaten Bondowoso	59,47	54,1	62,24	59	59,9	60,36	60,76	61,26	60,76
Kabupaten Situbondo	60,07	56,2	62,23	59,94	60,23	61,79	62,64	63,06	62,64
Kabupaten Probolinggo	59,83	56,8	61,33	59,12	59,75	60,63	60,97	61,44	60,97
Kabupaten Pasuruan	60,79	61,5	62,31	63,68	64,17	65,29	65,52	66,02	65,52
Kabupaten Sidoarjo	73,75	71,7	75,14	73,32	73,98	74,54	74,87	75,35	74,87
Kabupaten Mojokerto	68,14	67,7	69,17	69,54	70,26	70,61	71,99	72,51	71,99
Kabupaten Jombang	66,20	66	67,82	68,68	69,43	70,29	71,44	71,85	71,44
Kabupaten Nganjuk	65,60	64,7	68,07	67,16	67,51	68,47	69,25	69,73	69,25
Kabupaten Madiun	64,87	64,2	67,32	66,33	66,9	67,75	68,24	68,63	68,24
Kabupaten Magetan	67,58	67,4	69,56	69,78	69,91	70,55	71,2	71,79	71,2
Kabupaten Ngawi	64,52	62,3	66,72	64,39	65,15	65,96	67,52	68,02	67,52
Kabupaten Bojonegoro	62,19	60,6	64,20	63,24	63,6	64,93	65,5	65,83	65,5
Kabupaten Tuban	61,33	61,1	63,36	63,63	64,21	66,46	66,61	67,02	66,61
Kabupaten Lamongan	65,40	63,9	67,51	66,59	66,86	67,41	67,88	68,33	67,88
Kabupaten Gresik	69,90	69,3	72,12	70,77	71,64	72,51	73	73,49	73
Kabupaten Bangkalan	57,23	57,6	59,65	59,49	60,24	62,72	62,97	63,4	62,97
Kabupaten Sampang	54,49	49,7	55,78	54,16	54,98	56,27	56,99	57,66	56,99
Kabupaten Pamekasan	59,37	58,3	61,21	61,18	61,78	61,98	62,49	63,13	62,49
Kabupaten Sumenep	57,27	56,5	60,08	60,5	61,19	63,08	63,71	64,24	63,71
Kota Kediri	72,20	70,8	73,66	72,68	73,22	73,59	74,45	75,11	74,45
Kota Blitar	72,56	71	73,53	74,61	75,1	75,58	75,88	76,6	75,88
Kota Malang	76,69	71,4	78,04	73,19	73,85	75,34	75,72	76,19	75,72
Kota Probolinggo	67,30	67,7	68,93	70,52	71,31	71,51	72,76	73,29	72,76
Kota Pasuruan	69,69	67,7	72,01	70,77	71,44	71,98	72,2	72,6	72,2
Kota Mojokerto	72,78	72,8	74,20	74,22	74,64	75,15	75,66	76,11	75,66

Kota Madiun	75,98	70,7	77,21	73,51	73,88	74,35	75,42	75,89	75,42
Kota Surabaya	77,20	72	78,05	73,88	74,6	75,11	75,87	76,36	75,87
Kota Batu	68,66	69,76	70,62	69,89	71	71,45	72,83	73,33	72,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2009

Berikut merupakan perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018:

**Tabel 1.2**  
**IPM Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2018**  
**Metode Baru**

Kabupaten/ Kota	IPM Dengan Metode Baru								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27	70,77
Kabupaten Pacitan	61,14	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92	65,74	66,51	67,33
Kabupaten Ponorogo	64,13	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16	68,93	69,26	69,91
Kabupaten Trenggalek	63,67	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25	67,78	68,10	68,71
Kabupaten Tulungagung	67,28	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07	70,82	71,24	71,99
Kabupaten Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13	68,88	69,33	69,3
Kabupaten Kediri	66,24	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91	69,87	70,47	71,07
Kabupaten Malang	63,47	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47	69,94
Kabupaten Lumajang	59,62	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02	63,74	64,23	64,83
Kabupaten Jember	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96	65,96
Kabupaten Banyuwangi	64,54	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08	69	69,64	70,06
Kabupaten Bondowoso	59,47	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95	64,52	64,75	65,27
Kabupaten Situbondo	60,07	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53	65,08	65,68	66,42
Kabupaten Probolinggo	59,83	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83	64,12	64,28	64,85
Kabupaten Pasuruan	60,79	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04	65,71	66,69	67,41
Kabupaten Sidoarjo	73,75	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43	78,17	78,70	79,5
Kabupaten Mojokerto	68,14	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85	71,38	72,36	72,64

Kabupaten Jombang	66,20	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59	70,03	70,88	71,86
Kabupaten Nganjuk	65,60	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90	70,50	70,69	71,23
Kabupaten Madiun	64,87	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27	71,01
Kabupaten Magetan	67,58	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94	72,60	72,91
Kabupaten Ngawi	64,52	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32	68,96	69,27	69,91
Kabupaten Bojonegoro	62,19	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17	66,73	67,28	67,85
Kabupaten Tuban	61,33	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52	66,19	66,77	67,43
Kabupaten Lamongan	65,40	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84	70,34	71,11	71,97
Kabupaten Gresik	69,90	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57	74,46	74,84	75,28
Kabupaten Bangkalan	57,23	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,30	62,87
Kabupaten Sampang	54,49	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18	59,09	59,90	61
Kabupaten Pamekasan	59,37	60,42	61,21	62,2	62,66	63,10	63,98	64,93	65,41
Kabupaten Sumenep	57,27	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38	63,42	64,28	65,25
Kota Kediri	72,20	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67	76,33	77,13	77,58
Kota Blitar	72,56	73,08	73,53	74,53	75,26	76	76,71	77,10	77,58
Kota Malang	76,69	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05	80,46	80,65	80,89
Kota Probolinggo	67,30	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01	71,50	72,09	72,53
Kota Pasuruan	69,69	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78	74,11	74,39	74,78
Kota Mojokerto	72,78	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54	76,38	76,77	77,14
Kota Madiun	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	80,33
Kota Surabaya	77,20	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47	80,38	81,07	81,74
Kota Batu	68,66	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62	73,57	74,26	75,04

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018

Dari latar belakang masalah yang telah disebutkan, IPM di Kabupaten Jember periode 2010-2018 menarik untuk diteliti karena BPS menggunakan metode baru. Metode baru merupakan perubahan metodologi perhitungan dari beberapa indikator IPM dalam metode lama. Ada beberapa alasan dasar dalam perubahan metodologi perhitungan IPM, yaitu ada beberapa indikator yang sudah tidak relevan untuk dipakai kembali seperti halnya angka melek

huruf yang sudah tidak relevan dalam mengukur kualitas pendidikan. Selain itu penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi namun bisa ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain. Perlu diketahui di Indonesia sendiri penerapan metode baru dilakukan pertama kali tahun 2014 namun perhitungannya dimulai dari tahun 2010.<sup>9</sup> Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti perbandingan sebelum dan sesudah BPS menerapkan metode baru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi IPM yang meliputi faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di Kabupaten Jember.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh signifikan secara parsial faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru?
2. Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru?
3. Adakah perbedaan variabel IPM, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru?

---

<sup>9</sup> BPS, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", <http://www.bps.go.id/subject/26/index-pembangunan-manusia.html> (2014)

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara parsial faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru?
3. Untuk mengetahui perbedaan variabel IPM, pendidikan, kesehatan dan kemiskinan di Kabupaten Jember sebelum dan sesudah menggunakan metode baru

### D. Manfaat Penelitian

Selain untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat. Berikut beberapa manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi dan referensi pustaka bagi peneliti lain yang ada kaitannya terhadap penelitian sejenis dengan objek penelitian di Kabupaten Jember.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi IPM.
- b. Bagi instansi, perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengetahuan sekaligus salah satu rujukan di masa yang akan mendatang.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran tentang pengaruh faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan faktor kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Jember.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi pembangunan.
- e. Pemerintah daerah, khususnya untuk memperoleh kontribusi empiris berupa rekomendasi bagi pengembangan pembangunan perekonomian lokal secara sektoral.
- f. Memotivasi peneliti lain dalam rangka melakukan penelitian lebih luas dan komprehensif pada sektor pariwisata untuk mendorong pengembangan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.



## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>10</sup> Adapun macam-macam variabel penelitian yakni:

a. Variabel eksogen merupakan suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel endogen atau menjadi sebab suatu perubahan.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi variabel eksogen dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pendidikan ( $X_1$ )
- 2) Kemiskinan ( $X_2$ )
- 3) Kesehatan ( $X_3$ )

b. Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel endogen dan menjadi akibat dari adanya variabel yang dipengaruhi.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi variabel endogen dalam penelitian ini adalah:

- 1) IPM ( $Y$ )

### 2. Indikator Variabel

Indikator variabel merupakan alat ukur variabel yang berfungsi mendeteksi secara penuh dari variabel yang diukur.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 61.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 62.

- a. Indikator variabel eksogen meliputi :
  - 1) Indikator pendidikan meliputi :
    - (a) Harapan lama sekolah
    - (b) Rata-rata lama sekolah
    - (c) Melek huruf
  - 2) Indikator kemiskinan meliputi :
    - (a) Pengeluaran per kapita disesuaikan
  - 3) Indikator kesehatan meliputi :
    - (a) Angka harapan hidup saat lahir
- b. Indikator variabel endogen IPM di Kabupaten Jember dibatasi hanya pada periode 2010-2018 dengan menggunakan metode baru yang telah diperbarui.

## F. Definisi Operasional

Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasionalisasi terhadap pengukuran variabel atau *construct*. Definisi operasional merupakan penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan dengan lebih baik.<sup>13</sup> Adapun beberapa definisi operasional penelitian ini, meliputi:

### 1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menghitung IPM. Pada metode lama, faktor pendidikan terdiri dari dua indikator

<sup>13</sup> Nur Indiantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 68.

yakni angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka melek huruf. Sedangkan pada metode baru, faktor pendidikan tidak lagi menggunakan angka melek huruf melainkan diganti dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sendiri didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal.<sup>14</sup> Sedangkan HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa yang akan datang. Semua data indikator tersebut diambil dari BPS Kabupaten Jember. Untuk metode lama, data diambil dari periode tahun 2001-2009. Sedangkan data pada metode baru, diambil dari periode tahun 2010-2018.

## 2. Faktor Kemiskinan

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer minimal untuk hidup layak. Faktor kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam menentukan nilai IPM. Pada metode lama, faktor kemiskinan terdiri dari angka Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan pada metode baru, faktor kemiskinan PDB diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB). Karena ketidaksediaan data untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota maka PNB diganti menjadi pengeluaran per kapita yang disesuaikan.<sup>15</sup> Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran

<sup>14</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://ipm.bps.go.id/page/ipm> (2015).

<sup>15</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://ipm.bps.go.id/page/ipm> (2015).

per kapita dibuat konstan/riil.<sup>16</sup> Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas diantaranya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Data diperoleh dari BPS Kabupaten Jember dari tahun 2001-2009 untuk metode lama dan 2010-2018 untuk metode baru.

### 3. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan sendiri merupakan salah satu indikator sosial dalam mengukur suatu indeks pembangunan manusia yang telah ditetapkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pada metode lama maupun metode baru, faktor kesehatan tidak mengalami perubahan. Faktor kesehatan dihitung dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. AHH saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.<sup>17</sup> AHH didapatkan dari data yang ada di BPS Kabupaten Jember dari tahun 2001-2009 untuk metode lama dan 2010-2018 untuk metode baru.

### 4. IPM

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara/daerah merupakan negara/daerah yang maju maupun tidak. IPM sendiri adalah salah satu tolok ukur bagi pemerintah dalam menciptakan sebuah kesejahteraan penduduk negara/daerah tersebut. IPM dapat juga

---

<sup>16</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://ipm.bps.go.id/page/ipm> (2015).

<sup>17</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://ipm.bps.go.id/page/ipm> (2015)

mengukur pengaruh suatu kebijakan ekonomi dalam mempengaruhi kualitas hidup penduduknya.<sup>18</sup> IPM terdiri dari metode lama dan metode baru. Dalam metode baru digunakan karena dinilai lebih fokus terhadap masalah yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Angka IPM didapatkan dari data BPS Kabupaten Jember dari tahun 2001-2009 untuk metode lama dan 2010-2018 untuk metode baru.

#### 5. *Paired T-Test*

Analisis komparatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel atau lebih. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara dua kelompok data atau lebih, tergantung dari jenis data yang digunakan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini uji statistik dalam analisis komparatif yang digunakan adalah analisis komparatif menggunakan *paired t-test*. Alasan penggunaan *paired t-test* karena data yang dipakai dalam penelitian ini yakni data sekunder yang berjenis data rasio yang bersumber dari BPS Kabupaten Jember dari tahun 2001-2009 untuk IPM metode lama dan tahun 2010-2018 untuk IPM metode baru. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah

---

<sup>18</sup> BPS, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", <http://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html> (2014)

<sup>19</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 234.

menggunakan metode baru. Sehingga jenis analisis komparatif yang digunakan adalah analisis komparatif dua sampel yang berkorelasi.<sup>20</sup>

### **G. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian merupakan anggapan dasar atau postulat, dimana sebuah titik tolok pemikiran yang peneliti menerima kebenarannya.<sup>21</sup> Peneliti harus terlebih dahulu merumuskan anggapan dasar secara jelas sebelum peneliti melangkah dalam mengumpulkan data. Selain berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti anggapan dasar juga dapat mempertegas variabel yang menjadi fokus perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis. Adapun asumsi yang dimaksud adalah :

1. IPM merupakan suatu indeks yang digunakan untuk menghitung kesuksesan suatu negara dalam pembangunan sumberdaya manusia yang meliputi perhitungan sosial-ekonomi yang meliputi pendidikan, kesehatan dan kemiskinan.
2. Data yang digunakan merupakan data tahunan yang diambil dari BPS sebagai suatu lembaga yang dipercaya dan independen untuk mengolah dan menghitung IPM baik tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

### **H. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara peneliti dari rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah dalam sebuah penelitian biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Disebut sebagai jawaban

---

<sup>20</sup> Ibid., 235.

<sup>21</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 39.

sementara dikarenakan jawaban yang diberikan merupakan jawaban baru yang berlandaskan teori yang relevan, masih belum dibuktikan dengan fakta-fakta empiris yang didapat dari proses pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, bukan jawaban empirik.<sup>22</sup>

IPM sebagai suatu indikator ukuran sukses negara dalam mengurangi permasalahan sosial-ekonomi sekaligus menjadi inti dari pembahasan dalam penelitian ini memiliki faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM tersebut, meliputi faktor kesehatan, kemiskinan dan pendidikan. Faktor kesehatan dan pendidikan sebagai cerminan dari nilai sosial yang ada dalam IPM. Sedangkan kemiskinan menggambarkan sisi ekonomi dari IPM. Metode yang dipakai untuk menghitung IPM yakni metode lama dan metode baru. Metode lama dipakai semenjak IPM diperkenalkan oleh UNDP. Sedangkan metode baru dipakai mulai tahun 2010. Sedangkan di Indonesia sendiri metode baru digunakan semenjak 2014 dengan perhitungan yang dimulai pada tahun 2010. Berikut kerangka pemikiran dari uraian perbandingan dari kedua metode tersebut yakni:

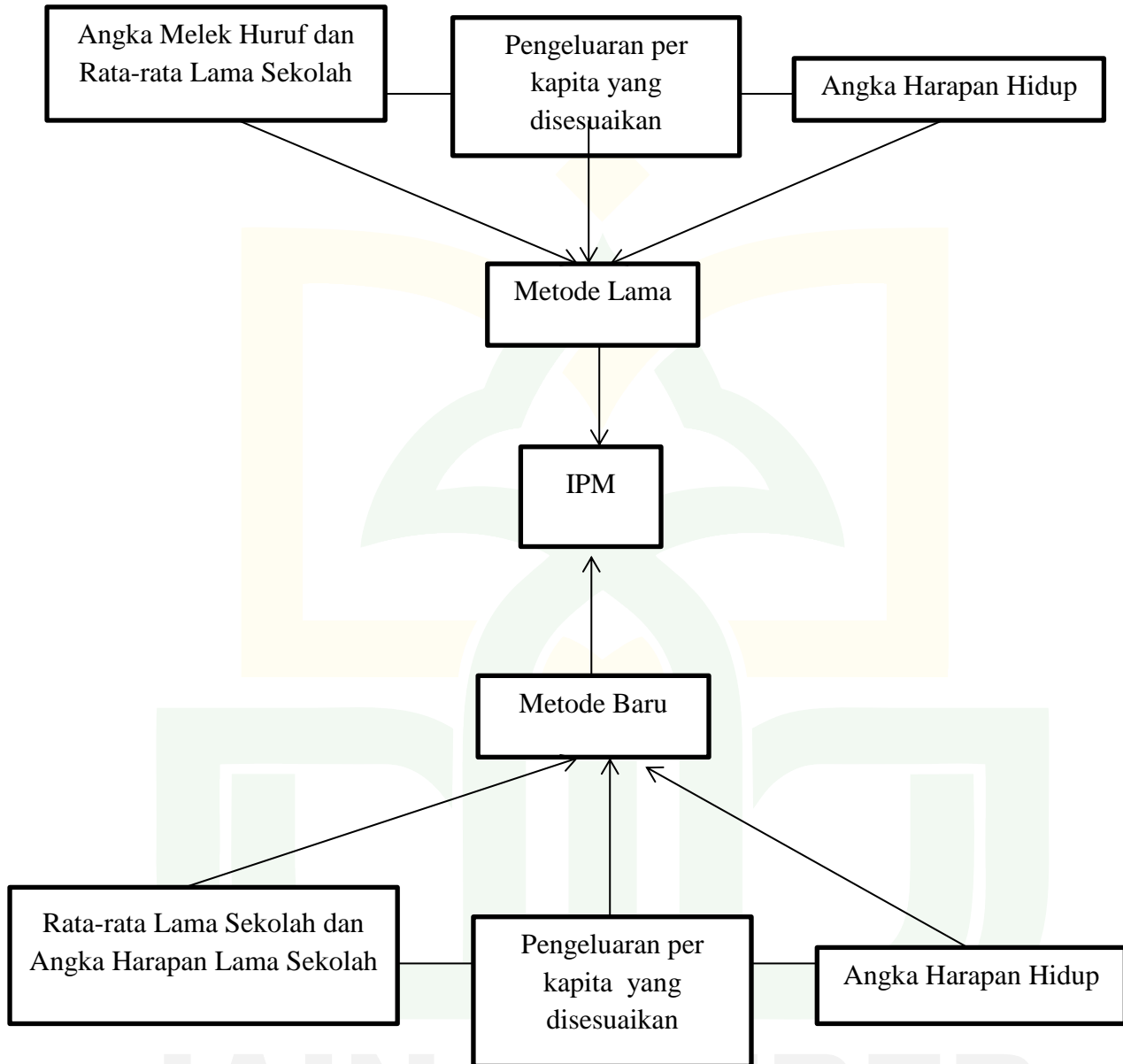
IAIN JEMBER

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2016), 63.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia

Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1.  $H_0$ : Tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

$H_1$ : ada pengaruh signifikan secara parsial antara faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

2.  $H_0$ : Tidak ada pengaruh signifikan secara simultan antara faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

$H_1$ : Ada pengaruh signifikan secara simultan antara faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

3.  $H_0$  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara IPM, faktor pendidikan, kemiskinan dan kesehatan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

$H_1$  : Terdapat perbedaan yang signifikan antara IPM, faktor pendidikan, kemiskinan dan kesehatan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

## **I. Metode Penelitian**

a. Pendekatan dan Jenis penelitian

1. Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai

pendekatan penelitian yang berlandaskan pola pikir dalam filsafat positivisme, yang digunakan peneliti dalam menganalisis populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif yang berupa statistik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau jawaban sementara yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

2. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian sekunder. Penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Data sekunder pada penelitian ini berupa data *time series* selama 2002-2009 untuk metode lama dan 2010-2017 untuk metode baru di Kabupaten Jember. Data diperoleh dari BPS Kabupaten Jember. Adapun data variabel yang dibutuhkan antara lain :

1. Data IPM Kabupaten Jember dengan metode lama periode 2001-2009 dan dengan metode baru periode 2010-2018.
2. Data AHH Kabupaten Jember periode 2001-2009 untuk metode lama dan data AHH Kabupaten Jember periode 2010-2018 untuk metode baru.
3. Data pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Jember periode 2001-2009.

---

<sup>23</sup> Ibid., 8.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 17.

4. Data pengeluaran yang disesuaikan Kabupaten Jember periode 2010-2018.
5. Data angka RLS dan angka HLS Kabupaten Jember periode 2010-2018.
6. Data angka melek huruf dan angka RLS Kabupaten Jember periode 2001-2009.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik acak atau nonacak yang digunakan.

Subjek penelitian dapat terdiri dari tiga level, yaitu:

1. Mikro merupakan level terkecil dari subjek penelitian dan hanya berupa individu.
2. Meso merupakan level subjek penelitian dengan jumlah anggota lebih banyak daripada mikro, misal keluarga atau kelompok.
3. Makro merupakan level subjek penelitian dengan anggota yang sangat banyak, misal masyarakat atau komunitas.

Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini level yang digunakan yaitu level makro karena

subjek penelitian yang diteliti meliputi kabupaten. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Kabupaten Jember.

c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam proses penelitian yakni berkenaan dengan data penelitian. Data penelitian sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan proses mengumpulkan informasi dan selanjutnya data tersebut dapat diolah dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut data dapat diterjemahkan dan diinterpretasikan sebagai kesimpulan penelitian. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen dan sebagainya.

Oleh karena itu dokumentasi adalah teknik menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini yakni data mengenai pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan dari BPS Kabupaten Jember.

d. Analisis Data

Setelah seluruh data yang didapat dari responden atau sumber data lain sudah terkumpul maka analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah hal tersebut. Kegiatan utama dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden atau sumber data. Kemudian membuat tabel atau daftar berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

a. Uji Statistik

1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- a. Nilai  $R^2$  antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ )
- b. Nilai  $R^2$  yang kecil: kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
- c. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu : variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji F

Uji F *analysis of variance* (ANOVA) adalah analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Uji F digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi artinya data sampel dianggap mewakili populasi.<sup>25</sup>

3) Uji T

Uji T dua variabel bebas adalah untuk membandingkan (membedakan) apakah kedua variabel tersebut sama atau beda.

Uji T digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi

---

<sup>25</sup> Riduwan Sunarto, *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 132.

(signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel).

b. Uji Komparatif

Proses pengujian komparatif dilakukan untuk mengukur ada atau tidaknya keberadaan variabel dari dua kelompok data atau lebih.

Berdasarkan hipotesis yang telah disebutkan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian komparasi berpasangan dalam dua sampel. Oleh karena itu, uji komparatif yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji Normalitas<sup>26</sup>

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov test*. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov test* dipilih karena lebih peka untuk mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan grafik. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Sampel berdistribusi normal apabila *Asymptotic sig >* tingkat keyakinan yang digunakan dalam pengujian, dalam hal ini adalah 95% atau  $\alpha=5\%$ . Sebaliknya dikatakan tidak normal apabila *asymptotic sig <* tingkat keyakinan. Jika hasil uji menunjukkan sampel berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik

---

<sup>26</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 153.

(*paired sampel t-test*). Tetapi jika sampel tidak berdistribusi normal maka uji beda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji non parametrik (*Wilcoxon Sign Rank Test*)

## 2) Uji *Paired Sample T-Test* (Uji T Sampel Berpasangan)<sup>27</sup>

*Paired Sampel T-test* atau uji T sampel berpasangan merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis sama atau tidak berbeda ( $H_0$ ) antara dua variabel. Data berasal dari dua pengukuran atau dua periode pengamatan yang berbeda yang diambil dari subjek yang dipasangkan.

## J. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan segala uraian dalam latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan. Penelitian ini ditulis dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan: Bab ini akan dibahas latar belakang mengenai pembangunan ekonomi secara nasional dan penting indeks pembangunan manusia, rumusan masalah/pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas.

Bab II Kajian Pustaka: Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori.

---

<sup>27</sup> Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 253.



Bab III Penyajian Data: Bab ini membahas penyajian data dan analisis data yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis dan penyajian hipotesis dan pembahasan.

Bab IV Penutup: Bab ini membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Kajian kepustakaan adalah uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang akan diteliti.<sup>28</sup> Kajian kepustakaan yang berisikan landasan untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya berupa penelitian terdahulu dan kajian teori.

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Studi mengenai analisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi IPM telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti dan menjadi referensi penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Septiana M. M. Sanggelarong, Vekie A. Rimate, dan Hanly F. DJ. Siwu (2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Sulawesi Utara”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Utara. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif sebesar 0.870. Sedangkan pengeluaran pemerintah di

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 89.

sektor kesehatan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM sebesar -0,438.<sup>29</sup>

2. Dwi Maumere Putra (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ridge” yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memodelkan karakteristik IPM Provinsi Jawa Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat tiga sektor pembentuk IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi dimana faktor-faktor dalam setiap sektor cenderung memiliki kolinieritas yang tinggi yang menyebabkan adanya kasus multikolinieritas. Apabila kasus multikolinieritas tidak diatasi, maka dapat menyebabkan variansi dari hasil estimasi parameter menjadi besar yang dapat berakibat pada banyaknya variabel prediktor yang tidak signifikan meskipun nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) tinggi. Sehingga untuk mengatasinya dilakukan pemodelan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur menggunakan metode Regresi Logistik Ridge. Terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu angka kematian bayi (X1), angka buta huruf (X4) dan angka partisipasi sekolah (X5). Dengan metode *Backward Elimination*, didapatkan model terbaik dengan ketepatan klasifikasi sebesar 97,37% yang menghasilkan 5 kabupaten/kota tergolong IPM menengah bawah, yaitu Kabupaten Bangkalan,

---

<sup>29</sup> Septiana M. M. Sanggalarong, Vekie A. Rumate dan Hanly F. DJ. Siwu, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15 (Juli, 2015), 2.

Sampang, Probolinggo, Situbondo dan Jember. Pada 33 kabupaten/kota yang lain tergolong dalam IPM menengah atas.<sup>30</sup>

3. Ni Putu Dera Yanthi dan I Nyoman Budiantara (2016) melakukan penelitian berjudul “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline di Jawa Tengah”. Dalam penelitian ini metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor adalah analisis regresi. Pada penelitian ini, pola data IPM dan faktor-faktor yang memengaruhi IPM di provinsi Jawa Tengah dilihat dari *scatterplot* memiliki pola data yang tidak diketahui bentuk polanya sehingga metode yang dapat digunakan adalah regresi nonparametrik spline. Model terbaik didapatkan dari titik knot optimal berdasarkan nilai *Generalized Cross Validation* (GCV) terkecil. Berdasarkan penelitian ini, model regresi nonparametrik spline terbaik adalah dengan menggunakan kombinasi knot (3,3,2,1,2) dan lima variabel signifikan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, rasio sekolah-siswa, kepadatan penduduk, angka kesakitan, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1juta setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Model tersebut memiliki  $R^2$  sebesar 93,14% dan *Mean Squared Error* (MSE) sebesar 6,45564.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dwi Maumere Putra, “Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ridge”, (Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015), 51.

<sup>31</sup> Ni Putu Dera Yanthi dan I Nyoman Budiantara, “Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline di Jawa Tengah”, *Jurnal Sains dan Seni*, 2 (2016), 2337-3520.

4. Betha Nurina Sari dan Priati (2016) melakukan penelitian berjudul “Identifikasi Keterkaitan Variabel dan Prediksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menggunakan *Dynamic Bayesian Networks* (DBN)”. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model prediksi tingkat IPM sangat dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dominan dan dijadikan sasaran fokus pengembangan dan perbaikan di daerah untuk dapat meningkatkan IPM. Penelitian ini menerapkan DBN untuk memprediksi dan memodelkan lima belas variabel yang mempengaruhi IPM. Struktur DBN dibangun dengan software CaMML, lalu dievaluasi dengan mengukur tingkat akurasi. Skenario eksperimen pada penelitian ini dibagi menjadi 4 skenario, yaitu perbedaan proposi data latih, data uji serta kategori tingkat IPM. Eksperimen menggunakan 75% data latih dan 25% data uji pada prediksi tiga kategori tingkat IPM menghasilkan tingkat akurasi yang terbaik, yaitu sebesar 88,461%. Struktur grafik DBN bisa menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Struktur grafik DBN yang terbangun bisa dijadikan model prediksi di mana dapat memberikan rekomendasi faktor utama apa yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kategori tingkat IPM di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu faktor pendidikan, faktor kependudukan, dan faktor kesehatan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Betha Nurina Sari dan Priati, “Identifikasi Keterkaitan Variabel dan Prediksi Indeks

5. Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsina (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel”. Penelitian menggunakan metode penelitian analisis panel data terhadap masing-masing tipologi. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa aspek yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia pada tipologi I adalah aspek kependudukan dan kesehatan yang meliputi jumlah penduduk, sarana kesehatan dan tenaga kesehatan; tipologi II adalah aspek kependudukan dan pendidikan yang meliputi jumlah penduduk dan sarana pendidikan; serta tipologi III adalah aspek kesehatan yaitu jumlah tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan IPM berbasis tipologi sistem wilayah pengembangan maka disarankan pada tipologi I perlu penambahan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta peningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; tipologi II perlu penambahan sarana pendidikan serta peningkatan akses pelayanan pendidikan terhadap masyarakat; dan tipologi III perlu penambahan tenaga kesehatan untuk bisa memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.<sup>33</sup>
6. Novita Dewi (2017) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks

---

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menggunakan *Dynamic Bayesian Networks (DBN)*”, *Jurnal Infotel*, 2 (November, 2016), 150.

<sup>33</sup> Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsin, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel”, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1 (Juni, 2017), 202-216.

Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”. Penelitian tersebut untuk melakukan pembuktian empiris mengenai pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap IPM sebesar 0,079. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1% di daerah tersebut akan menurunkan IPM sebesar 0,079. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM sebesar 0,024. Hal ini memiliki arti bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% di daerah tersebut akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0,024% di Provinsi Riau.<sup>34</sup>

7. Bayu Sutikno, Alfensi Faruk, dan Oki Dwi Purwani (2017) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap nilai IPM. Data yang digunakan adalah data panel dari BPS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model terbaik dari nilai IPM adalah model efek tetap komponen waktu yang diboboti oleh *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Sedangkan faktor yang berpengaruh signifikan adalah jumlah akses air

---

<sup>34</sup> Novita Dewi, “Pengaruh Kemiskinan dan Perumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi*, 1 (Februari, 2017), 1.

bersih rumah tangga, angka partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA), angka melek huruf, dan angka partisipasi angkatan kerja.<sup>35</sup>

8. Ratih Nurmalasari, Dwi Ispriyanti dan Sudarno (2017) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014)”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis IPM di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Data IPM Jawa Tengah dikategorikan rendah, sedang dan tinggi. IPM diduga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti partisipasi sekolah menengah tingkat, persentase lulusan sekolah menengah, persentase rumah tangga dengan air bersih akses, jumlah fasilitas kesehatan, tingkat pengangguran terbuka, dan partisipasi angkatan kerja menilai. Penelitian ini menggunakan regresi logistik ordinal dan regresi probit ordinal sebagai metode analisis statis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 adalah persentase rumah tangga dengan air bersih akses dan jumlah fasilitas kesehatan. Untuk mengevaluasi kinerja logistik ordinal regresi dan regresi probit ordinal, peneliti menggunakan akurasi klasifikasi dan *Akaike Information Criterion* (AIC). Berdasarkan akurasi klasifikasi

---

<sup>35</sup> Bayu Sutikno, Alfensi Faruk dan Oki Dwi Purwani, “Penerepan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM”, *Jurnal Matematika Integratif*, 13 (April, 2017), 1.



penelitian dan AIC dari masing-masing metode, hasilnya menunjukkan bahwa regresi logistik ordinal dan regresi probit ordinal memiliki baik hasil dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014.<sup>36</sup>

9. Syamsul Arifin (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan secara parsial terhadap IPM Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam serta mengetahui bagaimana IPM Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari BPS Lampung. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* yaitu tahun 2010-2015. Untuk proses analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan garis kemiskinan (X1), pengeluaran pemerintah (X2), ketimpangan distribusi pendapatan (X3) dan Indeks Pembangunan manusia (Y). Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan garis kemiskinan terhadap IPM. Dalam perspektif islam, kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat

---

<sup>36</sup> Ratih Nurmalasari, Dwi Ispriyanti dan Sudarno, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014”, *Jurnal Gaussian*,1 (2017), 111.

menyebabkan kerusakan pada kaum muslimin. Kerusakan disini berarti kekufuran dan kekufuran akan mendekatkan pada kekafiran yang berarti seseorang keluar dari agama Islam dan hal tersebut termasuk dosa besar. Tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan pengeluaran pemerintah terhadap IPM. Menurut pandangan Islam, masalah pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya dan termasuk kemaslahatan umat yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang bisa dinikmati oleh publik, begitu juga pelayanan kesehatan. Pengadaan pelayanan publik tersebut melalui kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat. Dan tidak adanya pengaruh dan tidak signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM. Pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama yaitu, distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem yang menganut pada aspek keadilan sosial masyarakat. IPM Lampung saat ini berada pada kategori menengah atas dengan nilai 66.95, ini menunjukkan bahwa kualitas SDM Lampung masuk kategori menengah atas, dengan demikian Lampung sudah mampu menciptakan kesejahteraan falah masyarakat dengan menekan angka ketimpangan di Lampung. Menurut perspektif ekonomi Islam, Lampung sudah dapat mewujudkan falah.<sup>37</sup>

10. Fitrah Sari Islami dan Nugroho SBM (2018) melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di

---

<sup>37</sup> Syamsul Arifin, “Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung,, 2017), 90.

Provinsi Jawa Timur, Indonesia”. Penelitian tersebut bertujuan untuk: (1) Mengetahui keadaan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur; (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan: (1) Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan wilayah; (2) Analisis regresi linear berganda *Ordinary Least Square* (OLS) dengan waktu penelitian tahun 2001-2015. Penelitian ini menggunakan *software* Eviews 9. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dengan nilai indeks Williamson lebih dari 1. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini ada tiga variabel yang hasilnya signifikan ( $\alpha=5\%$ ) dan berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yaitu variabel investasi, angkatan kerja dan IPM serta dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah.<sup>38</sup>

11. Yorgen Wally dan Wahyu Widayat (2018) melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan (IPM) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 1991-2016”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang memengaruhi IPM di Kabupaten Jayapura. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder kurun waktu tahun 1991-2016 bersumber dari BPS Kabupaten Jayapura, Dinas Kesehatan

---

<sup>38</sup> Fitrah Sari Islami dan Nugroho SBM., “Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia”, *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*, 1 (Januari,2018), 29.

Kabupaten Jayapura, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jayapura dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan yaitu Regresi Berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi IPM di Kabupaten Jayapura. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Kabupaten Jayapura digunakan analisis regresi berganda data times series. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti pada periode tahun 1991-2016 yang memengaruhi IPM di Kabupaten Jayapura secara positif dan signifikan adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara variabel jumlah penduduk miskin berpengaruh tidak signifikan.<sup>39</sup>

12. Rosnani Siregar, Nurul Izzah dan Siti Muninggar (2018) melakukan penelitian berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari

---

<sup>39</sup> Yorgen Wally dan Wahyu Widayat, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 1991-2016”, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018) 1.

publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Sampel yang digunakan sebanyak 20 data pertahun. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dimana  $t_{hitung} (0,1304) > \alpha (0,05)$ , kemiskinan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM dimana  $t_{hitung} (0,3076) > \alpha (0,05)$ , dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan  $t_{hitung} (0,0026) < \alpha (0,05)$ . Variabel pertumbuhan ekonomi (X1), kemiskinan (X2), dan pengeluaran pemerintah (X3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel IPM (Y) terlihat dari  $F_{hitung} (0,005144)$ .<sup>40</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Septiana M. M. Sanggelarong, Vekie A. Rumate, dan Hanly F. DJ. Siwu, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2015.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap IPM di Sulawesi Utara.	Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.  Subjek penelitian yakni Provinsi Sulawesi Utara.	Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda terhadap IPM.
2.	Dwi Maumere Putra, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015	Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Metode Regresi Logistik Ridge	Analisis data yang digunakan analisis data metode regresi logistik <i>ridge</i> .  Subjek penelitian yakni Provinsi Jawa Timur.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.

<sup>40</sup> Rosnani Siregar, Nurul Izzah dan Siti Muninggar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 1 (Juni, 2018), 106.

3.	Ni Putu Dera Yanthi dan I Nyoman Budiantara, , Jurnal Sains Dan Seni, 2016.	Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline di Jawa Tengah	Analisis regresi yang digunakan yakni analisis regresi <i>nonparametric spline</i> .  Subjek penelitian yakni Provinsi Jawa Tengah.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
4.	Betha Nurina Sari dan Priati, Jurnal Infotel, 2016.	Identifikasi Keterkaitan Variabel dan Prediksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menggunakan <i>Dynamic Bayesian Networks</i> (DBN).	Analisis data yang digunakan yakni analisis data menggunakan DBN.  Subjek penelitian yakni Provinsi Jawa Timur.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
5.	Zulfikar Mohamad Yamin Latuconsin, Journal of Regional and Rural Development Planning, 2017.	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel.	Analisis data menggunakan pendekatan wilayah dan regresi panel.  Subjek penelitian yakni Kabupaten Malang.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
6.	Novita Dewi, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Ekonomi, 2017.	Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.	Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.  Subjek penelitian yakni Provinsi Riau.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.  Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi linier berganda.
7.	Bayu Sutikno, Alfensi Faruk dan Oki Dwi Purwani, Jurnal Matematika Integratif, 2017	Penerepan Regresi Data Panel Komponen Satu Arah untuk Menentukan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IPM.	Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi data panel komponen satu arah.	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
8.	Ratih Nurmalasari, Dwi Ispriyanti dan Sudarno, Jurnal Gaussian, 2017.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menggunakan Metode Regresi Logistik	Analisis data yang digunakan yakni analisis data metode regresi logistik ordinal dan regresi	Objek penelitian yakni sama-sama IPM.

		Ordinal dan Regresi Probit Ordinal (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014.	probit ordinal.  Subjek penelitian yakni kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Syamsul Arifin, UIN Raden Intan, Lampung, 2017.	Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.	Variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah dan ketimpangan distribusi pendapatan.	Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda.  Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
10.	Fitrah Sari Islami dan Nugroho SBM., Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, 2018.	Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.	Analisis data yang digunakan yakni Indeks Williamson.  Subjek penelitian yakni Provinsi Jawa Timur.	Analisis data yang digunakan yakni analisis regresi linier berganda.
11.	Yorgen Wally dan Wahyu Widayat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tahun 1991-2016.	Variabel yang digunakan salah satunya yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  Subjek penelitian yakni Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.	Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  Objek penelitian yakni sama-sama IPM.
12.	Rosnani Siregar, Nurul Izzah dan Siti Muningar, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 2018.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1995-2014.	Variabel yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah.  Subjek penelitian yakni Provinsi Sumatera Utara.	Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  Objek penelitian yakni sama-sama IPM.

## B. Kajian Teori

### 1. Ilmu Ekonomi Pembangunan

#### a. Sejarah ilmu ekonomi pembangunan

Ilmu ekonomi pembangunan pada awal perkembangannya tidak dianggap sebagai disiplin ilmu sendiri karena tidak memiliki metode dan permasalahan yang khas dari ilmu tersebut. Akan tetapi semakin lama penilaian tersebut hilang seiring dengan banyaknya permasalahan ekonomi pembangunan dan juga semakin berkembangnya ilmu tersebut yang berada diluar jangkauan ilmu ekonomi klasik yang sudah ada sejak zaman dahulu.<sup>41</sup>

Ilmu ekonomi pembangunan ada dan diakui secara *de facto* sejak Adam Smith mengeluarkan buku berjudul *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* pada tahun 1776. Pada buku tersebut, Adam Smith membahas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sebuah bangsa bisa sejahtera. Topik ini yang kemudian menjadi topik inti dalam pembahasan ekonomi pembangunan modern. Akan tetapi, analisis Adam Smith masih berupa analisis statis, belum berkesinambungan dan hanya mengacu pada perekonomian barat saja. Sedangkan pokok pembahasan dari ekonomi pembangunan modern saat ini adalah negara-negara Dunia Ketiga.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: EKONISIA, 2010), 6.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 13.



Pasca Perang Dunia II, ilmu ekonomi pembangunan mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengalami evolusi yang semakin menyempurnakan fokus utama dari ekonomi pembangunan tersebut. Bermula dari pembahasan-pembahasan pengentasan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, angkatan kerja maupun perbaikan dalam pola pikir penduduk di negara-negara berkembang.

b. Definisi ilmu ekonomi pembangunan

Ilmu ekonomi pembangunan adalah ilmu yang mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri ada beberapa tahapan tentang definisi pembangunan ekonomi.<sup>43</sup> **Pertama**, definisi terkait dengan ilmu pembangunan

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat dibilang ada atau terjadi apabila pendapatan nasional riil sebuah negara (biasanya diukur dalam *Gross National Product* (GNP) riil atau dalam *Gross Domestic Product* (GDP) riil) berubah dari tingkat statis dan kemudian dapat tumbuh dalam tingkat 5 sampai 7 persen atau lebih dalam kurun waktu yang panjang.

**Kedua**, definisi tentang pembangunan ekonomi hampir mirip dengan definisi yang pertama, hanya sekarang dimasukkan faktor pertambahan jumlah penduduk suatu negara. Namun definisi ini memiliki beberapa kelemahan, misalnya jika kenaikan pendapatan

---

<sup>43</sup> Ibid., 8.

per kapita digunakan oleh rakyat untuk berinvestasi, maka jumlah konsumsinya justru akan mengalami penurunan sehingga tingkat kesejahteraan belum tentu akan meningkat.

**Ketiga**, pengertian tersebut secara umum dapat diterima sampai tahun 1970-an. Namun pengalaman yang terjadi di era 1960-an menunjukkan hal yang berbeda. Perbedaannya terletak pada masih banyak negara berkembang yang bisa meningkatkan pertumbuhannya secara umum bahkan berada pada tingkat yang tinggi, namun sebaliknya masih terbilang gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Sehingga bisa dibilang bahwa *trickle down effect* tidak begitu berjalan dengan baik sehingga menimbulkan koreksi terhadap definisi pembangunan ekonomi itu sendiri yakni sebagai penghapusan dan pengurangan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan tingkat pendapatan masyarakat dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sedangkan definisi yang keempat dari ilmu ekonomi pembangunan muncul dari pandangan ahli ilmu ekonomi pembangunan yang beranggapan bahwa cakupan pembangunan ekonomi bukan sekedar upaya dalam mengurangi keterbelakangan dalam hal ekonomi, namun juga upaya terhadap tidak meratanya hasil dari pembangunan itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah seperti jumlah kemiskinan yang meningkat, dan lapangan pekerjaan

yang terbatas. Hal ini juga disertai dengan upaya mengurangi pola pikir yang terbatas dari masyarakat dari negara berkembang.

## 2. Konsep Pembangunan

### a. Pembangunan dalam perpektif konvensional

Pembangunan mempunyai tiga komponen dasar yang menjadi nilai dasar atau inti dari adanya pembangunan itu sendiri yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Ketiga nilai dasar tersebut meliputi, kecukupan (*sustenance*), harga diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*).<sup>44</sup>

Dalam salah satu publikasi sebuah laporan keuangan yakni *World Development Report* yang terbit pada tahun 1991, Bank Dunia memberikan pernyataan secara tegas tentang tantangan utama dari pembangunan yakni perbaikan dalam segi kualitas kehidupan masyarakat. Terutama yang terjadi di negara-negara kategori miskin. Kualitas hidup bukan hanya berbicara tentang mencari pendapatan yang tinggi, namun harus juga menyentuh standar pendidikan, peningkatan standar pelayanan kesehatan yang lebih terjamin, penanggulangan kemiskinan, kebebasan individual, dan pelestarian ragam budaya yang dimiliki.<sup>45</sup>

Berdasarkan pernyataan Bank Dunia tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang

<sup>44</sup> Dharma, Pembangunan, 25.

<sup>45</sup> World Bank, "World Development Report 1991: The Challenge of Development", <http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5974>, (1991)

memiliki cakupan sangat luas bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi semata, namun lebih pada hal-hal yang mencakup struktur sosial yang harus diperbaiki, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan memiliki tiga tujuan utama, yakni:<sup>46</sup>

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok hidup, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Meningkatkan standar hidup masyarakat bukan hanya terletak pada peningkatan pendapatan saja, akan tetapi juga adanya ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, serta lebih memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung pada kepada orang dan bangsa-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan penderitaan akibat kemiskinan.

---

<sup>46</sup> Dharma, Pembangunan, 27.

b. Pembangunan dalam perpektif syariah

Ekonomi pembangunan syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Beberapa konsep dasar yang menjadi basis dalam ekonomi pembangunan syariah adalah *tauhid*, *khalifah*, keadilan dan *tazkiyah*.<sup>47</sup>

*Tauhid* merupakan implikasi bahwa seluruh makhluk adalah ciptaan Allah SWT., oleh karena itu sehendaknya seluruh makhluk hidup beriman kepada-Nya. Setiap perbuatan makhluk hidup selalu diawasi oleh Allah SWT., sehingga makhluk hidup tidak bisa berbuat seenaknya sendiri karena setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan harus diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya.

Dasar dari konsep Ekonomi Islam menyatakan bahwa manusia adalah sebagai *khalifah* di atas bumi. *Khalifah* disini sebagai artian manusia sebagai pemimpin di atas permukaan bumi yang bertugas memakmurkannya. Dalam konteks pembangunan, manusia mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan segala ketentuan Allah SWT. yang ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

<sup>47</sup> Nurul Huda dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta:Kencana, 2015), 180.

Pembangunan adalah upaya untuk mentransformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan lebih berkah. Itu semua bisa terjadi manakala proses pembangunan dilakukan secara adil. Oleh karena itu keadilan dinyatakan oleh Allah sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh manusia.

*Tazkiyah* adalah kerangka jalan yang didasarkan pada keadilan, keseimbangan dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah SWT. Dengan konsep *tazkiyah* ini, maka fokus utama pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat materi semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual yang ditentukan oleh kualitas moralitas yang ada. Karena itu, indikator yang dibangun juga harus bersifat komprehensif dan holistik, dimana kedua aspek ini mendapat tempat yang memadai dan proporsional.

### 3. Pembangunan Manusia

#### a. Konsep pembangunan manusia

Pembangunan manusia terasa begitu penting dikarenakan merupakan hal yang harus dilakukan yang bertujuan untuk mencetak SDM yang berkualitas yang nantinya dapat berguna untuk mencapai tujuan utama dari pembangunan itu sendiri yakni kesejahteraan. Dengan SDM yang baik maka akan mempermudah dalam berbagai sektor. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan

harus memiliki berbagai macam program yang mendorong meningkatnya kualitas SDM.

Pembangunan manusia, merupakan bagian yang penting, khususnya untuk negara-negara Dunia Ketiga. Karena sebagian besar negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi oleh sumber daya yang bagus sehingga kesenjangan sosial masih sangat dirasakan dan kemiskinan semakin meningkat karena pembangunan manusia merupakan sebuah investasi secara tidak langsung dengan tujuan perekonomian nasional.<sup>48</sup>

b. Definisi pengertian pembangunan manusia

IPM menurut UNDP adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikan keleluasan terhadap pilihan-pilihan bagi penduduk. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa objek atau sasaran utama dari adanya suatu pembangunan yakni manusia. Manusia disini sebagai tujuan akhir dari pembangunan tersebut. Sedangkan upaya pembangunan tersebut merupakan sarana dalam mencapai tujuan tersebut.

UNDP memberikan suatu pengertian yang mencerminkan bahwa manusia sebagai objek pembangunan selayaknya diberikan kebebasan dalam menentukan berbagai macam pilihan dan dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

---

<sup>48</sup> Christina Usmaliadanti, “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 33.

Pemerintah harus memberikan sarana sebagai penunjang bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diinginkan.

Pemerintah harus bijaksana dalam menentukan program-program yang menunjang pembangunan manusia tersebut. Seberapa jauh keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan manusia ini akan menentukan keberhasilan dalam mengentaskan masalah pendidikan, kemiskinan dan kesehatan yang menjadi faktor kesuksesan suatu pembangunan. Ketiga faktor tersebut dinilai sebagai cerminan selain pertumbuhan ekonomi guna untuk mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.

Selain itu ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dari pembangunan, yaitu:<sup>49</sup>

1. Penduduk sebagai pusat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memberikan pilihan-pilihan bagi penduduk. Pembangunan bukan hanya berfokus untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh sebab itu, konsep pembangunan manusia harus menjadikan penduduk secara keseluruhan sebagai pusat pembahasan dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

---

<sup>49</sup> Christina Usmaliadanti, “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 35.



3. Peningkatan kemampuan (kapabilitas) manusia bukan menjadi fokus utama pembangunan, namun terletak pada upaya-upaya dalam memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara maksimal dan efektif.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar utama, yakni produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia dijadikan dasar dalam setiap penentuan dari tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selanjutnya UNDP lebih luas lagi dalam menjabarkan empat pilar pokok yang mendukung pembangunan tersebut, yaitu:<sup>50</sup>

1. Produktivitas, produktivitas masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa mudah bersaing dan bisa berpartisipasi dalam proses mendapatkan penghasilan dan upah kerja. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari jenis pembangunan manusia.
2. Pemerataan, kesempatan yang diperoleh oleh individu masyarakat harus merata. Setiap hambatan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik harus dihapus supaya masyarakat bisa berpartisipasi di dalamnya dan bisa mendapatkan manfaat dari kesempatan itu.

---

<sup>50</sup> Ibid., 36.

3. Kestinambungan, kesempatan yang didapatkan harus bisa dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, namun juga berlanjut untuk generasi yang akan datang. Setiap bentuk permodalan fisik, manusia dan lingkungan hidup harus bisa dilengkapi.

4. Pemberdayaan, masyarakat harus bisa melakukan pembangunan dan manfaatnya bukan hanya untuk mereka saja. Namun masyarakat agar ikut berpartisipasi penuh dalam setiap pengambilan keputusan dan proses-proses yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Pembangunan manusia pada hakikatnya yakni memberi kebebasan terhadap semua masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihannya pada berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut mencakup aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya maupun aspek-aspek yang lainnya. Berbagai pilihan tersebut mencakup dari tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai tujuan strategis pembangunan nasional. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua hal yang penting, yakni berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan maupun sisi pengentasan kemiskinan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka

untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.<sup>51</sup>

Aspek pembangunan manusia tercermin dari IPM. IPM merupakan alternatif untuk mengukur pembangunan selain GDP. Nilai IPM suatu wilayah/negara menilai sejauh mana keberhasilan program pembangunan suatu wilayah/negara dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. IPM menilai dari sisi pendidikan, kemiskinan dan kesehatan semua lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial masyarakat.

Tingkat pendidikan, pengeluaran per kapita dan kesehatan menjadi tolok ukur pembangunan dan merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan SDM. Dengan meningkatnya ketiga faktor tersebut menentukan kemampuan menyerap dan mengelola SDM sehingga kesejahteraan yang diharapkan setiap negara menjadi terealisasikan.

Dalam ekonomi pembangunan Islam, SDM pada hakikatnya adalah objek dan subjek dari sebuah pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan suatu pembangunan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., 36.

<sup>52</sup> Enny Ariani, "Potret Ketertinggalan Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia", *Jurnal Ekonomi*, 1 (2000), 165.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

##### a. IPM

IPM atau *Human Development Indeks* merupakan bentuk konsep baru yang akan menjawab berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial-ekonomi yang sebelumnya masih tidak bisa terpecahkan dengan perhitungan yang dilakukan sebelumnya. IPM merupakan suatu konsep perhitungan baru yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1990. IPM sendiri merupakan konsep perhitungan yang lebih komprehensif dan terukur daripada perhitungan GNP yang dilakukan sebelumnya. IPM juga bisa membandingkan kualitas sosial-ekonomi antar negara dengan cara yang sedikit lebih berbeda.<sup>53</sup>

Terdapat beberapa tujuan penting dalam perhitungan IPM, diantaranya:<sup>54</sup>

- a. Membuat indikator yang dapat mengukur dimensi dasar dari pembangunan manusia dan kebebasan memilih yang luas.
- b. Memanfaatkan beberapa indikator untuk menjaga stabilitas ukuran tersebut agar tetap sederhana.
- c. Membentuk suatu indeks komposit yang kompatibel daripada menggunakan beberapa indeks dasar.

---

<sup>53</sup> Christina Usmaliadanti, "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009", (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 37.

<sup>54</sup> Ibid., 38.

- d. Menciptakan suatu perhitungan yang dapat mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Dalam IPM terdapat tiga komposisi dasar sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur IPM suatu negara yaitu, indikator pendidikan, indikator kemiskinan dan indikator kesehatan. Ketiga faktor tersebut sudah menggambarkan masalah sosial dan ekonomi sebagai jawaban permasalahan pembangunan nasional.

Indikator pendidikan menggabungkan dua faktor utama yaitu, rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Semakin tinggi kedua faktor utama ini maka semakin tinggi pula indikator pendidikannya. Sedangkan indikator kemiskinan diukur oleh pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator kesehatan sendiri diukur oleh tingkat angka harapan hidup penduduk.<sup>55</sup>

Skor IPM berkisar antar angka 0 sampai 1. Semakin mendekati angka satu maka semakin baik IPM suatu negara dan semakin berkualitas SDM. UNDP mengelompokkan skor IPM menjadi empat kategori, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) *Very high HDI* : untuk nilai IPM > 0,800
- 2) *High HDI* : 0,700 < nilai IPM < 0,800
- 3) *Medium HDI* : 0,550 < nilai IPM < 0,700
- 4) *Low HDI* : nilai IPM < 0,550

<sup>55</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 147.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 148.

Selain permasalahan tersebut, masalah kemiskinan yang masih rentan menjadi isu yang selalu krusial. Dengan situasi perekonomian global yang tidak menentu menjadikan kemiskinan selalu menjadi diskusi yang menarik. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas SDM dan menyebabkan kelompok yang rentan terhadap kemiskinan terjatuh ke dalam kategori kelompok miskin.

Untuk itu setiap negara harus memiliki kebijakan pembangunan yang tepat agar kelompok yang rentan dalam kemiskinan tidak jatuh kembali pada kemiskinan. Salah satu cara yang menjadi solusi yakni meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Untuk itu adanya upaya dan pendekatan yang bersifat komprehensif, dimana sektor pendidikan dapat menciptakan kualitas SDM yang unggul dan pelayan kesehatan yang baik.

Dalam menghitung IPM, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

$X_1$  : Indeks Pendidikan

$X_2$  : Indeks Kemiskinan

$X_3$  : Indeks Kesehatan

Dari beberapa indikator tersebut terlebih dahulu menghitung per indeksnya sehingga bernilai 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk

memudahkan dalam menganalisis, biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:\

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i \quad I_i : I_i = \frac{X_i - M - X_i}{Max - X_i - Min X_i} \dots\dots\dots$$

Dimana :

$I_i$  = Indeks komponen IPM ke  $i$  , dimana  $i = 1,2,3$

$X_i$  = Nilai indikator komponen IPM ke  $i$

$MaxX_i$  = Nilai maksimum  $X_i$

$MinX_i$  = Nilai minimum  $X_i$

Ada beberapa hal yang membedakan perhitungan IPM yang dilakukan oleh BPS dan UNDP dikarenakan ketersediaan data yang dimiliki oleh BPS. Berikut hal-hal tersebut yang membedakan perhitungan IPM yang dilakukan oleh BPS dan UNDP:<sup>57</sup>

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk (SP) 2010, proyeksi penduduk).
2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
3. PNB per kapita tidak tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

<sup>57</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://ipm.bps.go.id/page/ipm> (2015)

4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk perbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

b. Indeks Pendidikan

Salah satu cara agar masyarakat suatu negara dapat bersaing dengan masyarakat negara lainnya maka faktor pendidikan yang baik akan menunjang peningkatan kualitas SDM yang unggul dan mampu bersaing. Sektor pendidikan akan memproduksi SDM ke arah yang lebih baik atau bahkan lebih buruk di masa yang akan datang.

Dalam pembangunan nasional, sektor pendidikan akan menjadi gambaran bagi suatu pemerintahan yang berhasil atau tidak. Sehingga suatu pemerintahan yang tidak dapat menangani masalah pendidikan masyarakatnya, maka dianggap gagal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pembangunan nasional yang tepat dan efektif dalam menangani masalah ini.

Dalam IPM, yang menjadi salah satu tolok ukur untuk sektor pendidikan yakni angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan yang dijalani oleh masyarakat.



c. Indeks Kemiskinan

Salah satu yang selalu menjadi masalah bagi semua negara di dunia yakni adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu dari ketidakmampuan individu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia, kemiskinan semakin terpuruk setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.<sup>58</sup> Lebih jauh lagi disebutkan

kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis standar kebutuhan minimum yang berlaku. Bappenas memberikan pengertian tentang kemiskinan, dimana kemiskinan sebagai kondisi individu atau kelompok masyarakat, baik laki-laki atau perempuan yang tidak dapat memenuhi hak dasar konsumsinya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan agar tetap bermartabat. Sedangkan PBB memiliki pengertian sendiri tentang kemiskinan yakni sebagai keadaan dimana seseorang tidak dapat menikmati pilihan-pilihan dan bermacam kesempatan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti tidak dapat

---

<sup>58</sup> BPS, "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", <http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> (t.t)

memenuhi kesehatan, standar hidup pribadi, kebebasan sosial, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain yang dapatkan.

Sedangkan *World Bank* mendefinisikan sebab kemiskinan karena kurangnya pendapatan dan aset yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, misalnya kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Di samping itu, kemiskinan juga disebabkan karena adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang masuk dalam kategori miskin yakni seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang layak serta tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan mereka juga kurang memadai.

Indikator utama kemiskinan seperti yang dikutip oleh BPS, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Minimnya akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Minimnya penjaminan terhadap masa depan seseorang (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan apabila terjadi guncangan yang bersifat individual maupun kelompok.

5. Kualitas SDM yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
6. Minimnya apresiasi pihak lain dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Lapangan kerja yang minim dan minimnya mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakberdayaan untuk berusaha karena memiliki cacat fisik maupun mental.
9. Merasa tidak mampu dan ketergantungan sosial yang tinggi.

Sedangkan untuk ukuran kemiskinan menurut Kuncoro secara sederhana dan umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>59</sup>

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang bisa dikategorikan masuk dalam golongan kemiskinan absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini ditentukan dengan maksud untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik masyarakat.

Kesulitan utama dalam kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat

---

<sup>59</sup> Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 56.

kebiasaan saja, tetapi juga berbagai faktor pendukung lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan sosialnya.

## 2. Kemiskinan Relatif

Seseorang bisa dikategorikan masuk dalam golongan kemiskinan relatif apabila seseorang tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya namun masih jauh berada di bawah masyarakat sekitarnya. Garis kemiskinan akan mengalami perubahan-perubahan atau dinamis. Oleh karena itu penilaian terhadap kemiskinan seseorang relatif atau tergantung dengan kualitas hidup masyarakat yang ada disekelilingnya.

Kemiskinan dalam kategori ini dapat mengakibatkan aspek ketimpangan sosial. Artinya terdapat perbedaan tingkat hidup golongan atas dan golongan bawah yang mengakibatkan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin relatif semakin.

## 3. Kemiskinan Kultural

Seseorang yang masuk dalam kategori kemiskinan kultural jika sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut enggan untuk berusaha memperbaiki kualitas kehidupan yang dijalaninya meskipun kelompok ini

mendapatkan bantuan dari pihak lain. Artinya seseorang tersebut dikategorikan miskin karena atas dasar kemauannya sendiri dan mereka tidak mau mengubah sikapnya yang pemalas dan enggan memperbaiki kondisinya.

Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS dalam perhitungan IPM menggunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dalam setahun diperoleh dari SUSENAS dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas diantaranya merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan

#### d. Indeks Kesehatan

Selain kedua faktor tersebut, ada salah faktor pembentuk dari IPM yang selalu menjadi pembahasan yang menarik, yakni kesehatan. Selain mutu pendidikan yang terus dikembangkan guna menunjang terbentuknya SDM, terdapat mutu kesehatan dimana faktor kesehatan juga mempengaruhi dalam membentuk SDM yang berkualitas. Kekurangan sumber asupan yang baik untuk kesehatan akan menyebabkan penduduk memiliki kualitas manusia yang rendah sehingga memiliki tingkat mental terbelakang. Oleh karena

itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kesehatan masyarakat-guna meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.

Dalam pembangunan nasional yang melibatkan manusia sebagai pemeran utama, kesehatan menjadi aspek dalam membentuk IPM. Dalam indeks kesehatan terdapat indikator yaitu AHH penduduk pada saat melahirkan. Indikator ini yang menjadi tolok ukur sehingga dapat diharapkan bisa dinikmati oleh masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan harapan setelah memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun dapat mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya dalam memperoleh informasi terkait orang meninggal pada waktu tertentu, maka dalam menghitung indikator AHH menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini data yang digunakan adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Untuk mendapatkan AHH dengan cara menstandarkan AHH terhadap nilai minimum dan maksimumnya.

e. IPM secara perspektif islam

Secara umum konsep IPM ini belum menggambarkan kondisi SDM yang ideal, apalagi aspek spiritual tidak dimasukkan dalam perhitungannya. Namun secara umum ini adalah konsep yang telah

disepakati oleh negara-negara di dunia sebagai tolok ukur dan perbandingan negara satu dengan negara yang lainnya.<sup>60</sup>

Dalam hal pembangunan di sektor pendidikan, pembangunan sumber daya manusia bukan hanya ditekankan oleh aspek materiil sebagai suatu tujuan hidup manusia, namun juga lebih menekankan kepada aspek spiritual sebagai bekal hidup manusia setelah meninggal. Sehingga sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut secara seimbang. Keseimbangan ini akan tercapai apabila sisi yang dibangun bukan hanya dalam aspek memperdalam pengetahuan, namun juga aspek akhlak atau tingkah laku manusia.

Di dalam sektor kesehatan, Islam mengajarkan agar semua manusia selalu punya pola hidup sehat. Karena apabila manusia dalam keadaan sakit maka semua aktivitas manusia termasuk ibadah akan terganggu. Dalam hal ini dibutuhkan peran pemerintah untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran pemerintah di dalam sektor kesehatan yakni menjamin semua pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pelayanan yang baik. Pelayanan kesehatan baik berupa pemberian bantuan kesehatan, akses lokasi untuk mencapai pusat kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan lain-lain.

---

<sup>60</sup> Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, 148.

Dalam sektor kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat perlu adanya kebijakan yang tepat, agar SDM yang ada mampu bersaing. Dalam Islam mengajarkan, bahwa setiap manusia diwajibkan untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Namun bukan hanya bekerja demi mengejar aspek materiil saja, namun juga aspek spiritual. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang digambarkan oleh semakin berkurangnya masyarakat yang hidup miskin tidak terlepas dari kualitas pendidikan masyarakat. Pendidikan akan membentuk SDM yang unggul sehingga mampu bersaing. Sehingga konsepsi Islam terkait ekonomi harus terakomodasi dalam sistem pendidikan agar dapat menghasilkan *output* SDM yang paham tentang Islam sehingga dapat dipraktikkan dimanapun berada.

f. IPM dengan metode baru

UNDP pada bulan November tahun 2010 memperkenalkan perhitungan IPM dengan metode yang baru sebagai jawaban atas beberapa kritik terhadap metode perhitungan yang lama. Perhitungan indeks ini masih berdasarkan standar hidup (kemiskinan), pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa perubahan dan pembaharuan metode yang digunakan sehingga dapat



disesuaikan dengan kebutuhan perhitungan IPM yang lebih baik. Adapun perubahan-perubahan dalam metode yang baru yakni:<sup>61</sup>

1. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita menggantikan produk domestik bruto (GDP) per kapita. Perubahan ini seyogyanya merupakan suatu perbaikan yang tidak ambigu. GNI mencerminkan apa yang dapat dilakukan oleh warga negara dengan pendapatan yang mereka peroleh, meski tidak demikian halnya dengan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di sebuah negara yang dinikmati seseorang di luar negara tersebut. Pendapatan yang diperoleh di luar negeri masih dapat menguntungkan sebagian warga negara. Ketika arus perdagangan dan pengiriman uang telah meluas dengan cepat dan bantuan telah ditargetkan lebih baik ke negara-negara berpendapatan sangat rendah, perbedaan GNI dan GDP menjadi semakin penting.
2. Indeks pendidikan diubah secara keseluruhan. Dua komponen baru telah ditambahkan, yaitu rata-rata pendidikan aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan oleh anak-anak masa kini. Masing-masing perubahan ini dapat menimbulkan berbagai implikasi. Jelas sekali bahwa penggunaan ukuran pencapaian pendidikan aktual rata-rata lama sekolah sebagai indikator perbaikan

---

<sup>61</sup> Dharma, Pembangunan, 65.

yang tidak ambigu. Estimasi dimutakhirkan secara teratur dan statistik dengan mudah diperbandingkan secara kuantitatif antarnegara.

3. Pencapaian pendidikan yang diharapkan dalam metode baru merupakan komponen baru lainnya yang sedikit ambigu bagi kalangan ahli ekonomi. Ukuran tersebut bukan merupakan pencapaian negara namun hanya sebuah ramalan yang dilakukan PBB.
4. Dua komponen yakni angka melek aksara dan partisipasi sekolah yang sebelumnya digunakan sebagai indikator dalam indeks pendidikan sekarang tidak digunakan lagi. Pengukuran angka melek aksara tidak dilakukan dengan baik dan terlalu jarang. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa ukuran itu ditetapkan sedang-sedang saja di berbagai negara berkembang. Selain itu partisipasi sekolah bukanlah jaminan penyelesaian tingkat pendidikan atau apakah peserta didik benar-benar belajar atau bahkan dapat terjadi bahwa peserta didik mangkir dari sekolah.
5. Patokan tujuan atas (nilai maksimum) di setiap dimensi dinaikkan pada nilai maksimum. Terbukti bahwa cara penentuan seperti ini mengembalikan indeks tersebut ke desain aslinya yang justru dikritik karena kurang

memperhitungkan pencapaian-pencapaian kecil negara-negara yang melakukan pembangunan dari bawah sekali.

6. Patokan tujuan bawah bagi tingkat pendapatan telah dikurangi. Hal ini didasarkan pada estimasi pencapaian Zimbabwe pada tahun 2007 dengan asumsi bahwa penafsirannya tidak keliru yang mewakili pendapat terendah dalam sejarah.
7. Perbedaan kecil lainnya adalah ketimbang penggunaan logaritma umum untuk mencerminkan manfaat pendapatan marginal yang semakin menurun HDI yang baru sekarang memakai logaritma natural. Hal ini mencerminkan cara yang lebih umum dilakukan dalam pembuatan indeks.
8. Barangkali perubahan yang paling berdampak adalah perhitungan HDI dengan rata-rata geometri.

IAIN JEMBER

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambar Objek Penelitian

##### 1. Kabupaten Jember

###### a. Sejarah

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember secara batas wilayah berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember juga terletak di wilayah Tapal Kuda atau yang sering dikenal sebagai Karesidenan Besuki.<sup>62</sup>

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan *Staatsblad* Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk *Regenschap Djember* sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda *De Aglemeene Secretaris* (G.R.) Erdbrink, 21 Agustus 1928. Pada dasarnya pembentukan Kabupaten

---

<sup>62</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Arsip Negara Tentang Batas Daerah Kabupaten Lumajang Dengan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Jember terjadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan hasil pembentukan dari pemerintahan Hindia-Belanda.<sup>63</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintah daerah kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. Dahulu Kabupaten Jember memiliki kota administratif, tetapi sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2003 maka istilah kota administratif dihilangkan sehingga kembali bergabung ke Kabupaten Jember.<sup>64</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang pembentukan Kota Administratif Jember maka dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumpalsari, Patrang dan Kaliwates.
- b. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

---

<sup>63</sup> Wikipedia, "Kabupaten Jember", [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Ekonomi).

<sup>64</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Kota Administratif Purwokerto, Kota Administratif Klaten, Kota Administratif Jember, dan Kota Administratif Watampone.

<sup>65</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Kota Administratif Jember.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah *kewedanan* Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh wilayah pembantu bupati, satu wilayah kota administratif, dan 31 kecamatan.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga pembantu bupati yang kini menjadi kantor koordinasi camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era otonomi daerah ini pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat kantor Koordinasi Camat, yakni<sup>66</sup>:

- a. Kantor Koordinasi Camat Jember barat di Tanggul
  - b. Kantor Koordinasi Camat Jember selatan di Balung
  - c. Kantor Koordinasi Camat Jember tengah di Rambipuji
  - d. Kantor Koordinasi Camat Jember timur di Kalisat
- b. Penduduk

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember terdiri atas suku Jawa dan suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu

---

<sup>66</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/BAPPENAS RI), UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dominan di daerah utara dan Suku Jawa di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan pengaruh tersebut memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya Pendalungan.<sup>67</sup>

Masyarakat Pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian Can Macanan Kaduk merupakan satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember. Hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Jember menjadi salah satu kabupaten yang unik dengan berbagai kebudayaan yang dimiliki.

### c. Ekonomi

Berdasarkan kondisi demografi, Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya merupakan petani. Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani, perekonomian Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian

---

<sup>67</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Arsip Negara Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

perkebunan. Sehingga hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bergerak di sektor pertanian.<sup>68</sup>

Di Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Perkebunan yang ada dikelola oleh perusahaan nasional Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN), Tarutama Nusantara (TTN), dan perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan. Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember adalah tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu. Di pasaran dunia tembakau, Jember sangat dikenal hingga di Jerman dan Belanda dan negara-negara Eropa lainnya.

Selain terkenal pada sektor pertanian dan perkebunan yang mampu bersaing di kancah internasional, Kabupaten Jember juga terkenal pada sektor perikanan. Jember cukup diperhitungkan dalam perikanan karena memiliki salah satu lautan yang kaya akan hasil laut terutama yang terletak di selatan kabupaten ini.

Kedua sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Jember. Dengan potensi yang besar tersebut namun pengolaannya masih belum maksimal sehingga perkembangannya lambat. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dan kebijakan

---

<sup>68</sup> BPS, “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2018/08/23/ed0fddee041f0944344af43b/kabupaten-jember-dalam-angka-2018.html>



yang efisien dari pemerintah setempat agar dapat dikembangkan secara maksimal.

## 2. IPM

### a. IPM

IPM diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, metode penghitungan IPM telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada tahun 2010, metode penghitungan IPM diubah kembali secara mendasar oleh UNDP. Dalam metode baru ini diperkenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan PNB per kapita yang menggantikan PDB per kapita.

Indonesia mulai menghitung IPM sejak tahun 1996 dan melakukannya secara berkala setiap tiga tahun sekali. Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah, terutama dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian. Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi pendapatan yang menggantikan PNB per kapita yang belum tersedia di tingkat kabupaten/kota.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> BPS, "Indeks Pembangunan Manusia", <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

Sejak tahun 2015, pembangunan pada tataran global mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini berkaitan dengan beberapa isu krusial yang berpengaruh secara global, seperti deplesi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan yang hendak dicapai.<sup>70</sup>

Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39, meningkat sebesar 0,58 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Indonesia termasuk dalam kategori tinggi untuk pembangunan manusia.

Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,20 tahun yang berarti bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan akan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun. Penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas, rata-rata sudah menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas VIII. Sedangkan penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,91 tahun atau setara dengan Diploma I. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp11.059.000,00 (diseragamkan) per kapita per tahun.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKUE RI), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

<sup>71</sup> BPS, *Indeks Pembangunan Manusia 2018* (Jakarta:BPS,2018),2.

Berdasarkan laporan BPS pada bulan Agustus Tahun 2018 tercatat bahwa IPM Kabupaten Jember sendiri tumbuh sekitar 1 persen. Angka tersebut naik daripada tahun sebelumnya menjadi 65,96. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Jember sebagai kabupaten dengan nilai IPM tertinggi se-Tapal Kuda. Kabupaten Jember berada di bawah Kabupaten Banyuwangi dan di atas Kabupaten Lumajang yang memiliki nilai terendah yakni 64,83.<sup>72</sup> Namun di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember masih berada di urutan ke-31 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, bisa dikatakan meskipun memiliki kenaikan yang cukup tinggi namun Kabupaten Jember masih di bawah kabupaten/kota lain. Status pencapaian IPM Kabupaten Jember 2018 masuk dalam kategori sedang karena berada di angka 60-70. Maka dibutuhkan sebuah formulasi kebijakan yang tepat agar dapat menggenjot kenaikan nilai IPM dengan cepat.

b. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menilai dari pembangunan manusia suatu negara. Pendidikan menjadi sebuah cerminan bagi suatu bangsa dalam tingkat keberhasilan meningkatkan daya saing bagi suatu negara dengan negara yang lainnya. Semua negara di dunia bersaing dalam meningkatkan

---

<sup>72</sup>BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia Tahun 2018”, <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.

kualitas pendidikan yang baik agar generasi bangsanya dapat bersaing dengan negara lainnya.

Di bidang pendidikan, beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 antara lain pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas; peningkatan kualitas pembelajaran; peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa dan lain-lain. Salah satu isu penting pendidikan adalah program wajib belajar 12 tahun. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berusaha melakukan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas serta meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas.<sup>73</sup>

Untuk Kabupaten Jember, indeks pendidikan sebagai salah satu indikator penilaian IPM setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Namun hal ini sebagai pertanda bahwa beberapa kebijakan pemerintah daerah telah berhasil untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dalam laporan terakhir BPS tahun 2018 yakni pada angka 6,07 atau naik sekitar 0,01 dari tahun 2017

---

<sup>73</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KEMENKUE RI), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

pada angka 6,06. Meskipun meningkat tidak signifikan, namun tren naik selalu terjadi pada setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun Kabupaten Jember berhasil dalam meningkatkan pendidikan di kabupaten tersebut.<sup>74</sup>

c. Indeks Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan menjadi suatu alat ukur dalam menentukan IPM sebuah negara. Jika semakin meningkat IPM suatu negara maka semakin meningkat pula kualitas kesehatan suatu negara. Kesehatan menjadi momok bagi beberapa negara karena masyarakat bukan hanya butuh terhadap peningkatan ekonomi namun pelayanan kesehatan yang mumpuni. Beberapa negara mengalami peningkatan secara ekonomi namun masyarakatnya masih tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka harapan hidup, gizi maupun pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, kesehatan gizi ibu dan anak terpantau cukup baik dan fasilitas kesehatan terus meningkat. Namun demikian, kondisi kesehatan lingkungan masyarakat dan kesadaran terhadap perilaku sehat juga masih harus ditingkatkan. Artinya antara pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung supaya semua kebijakan terkait kesehatan terlaksana dengan baik.

---

<sup>74</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia Tahun 2018”, <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.

Untuk Kabupaten Jember, indeks kesehatan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Meskipun peningkatannya tidak signifikan namun hal tersebut tetap positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah daerah semakin baik dalam memperbaiki indeks kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan terakhir BPS tahun 2018 yang menyatakan bahwa seorang bayi memiliki peluang untuk hidup 68,74 tahun atau naik sebesar 0,2 persen daripada tahun sebelumnya yakni di angka 68,54. Hal tersebut menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami perbaikan.<sup>75</sup>

d. Indeks Kemiskinan

Di bidang ekonomi, kondisi perekonomian yang kondusif telah berkontribusi besar dalam peningkatan kehidupan yang layak, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian, hal ini harus terus ditingkatkan agar dapat berdampak lebih besar dalam mengurangi masalah disparitas capaian pembangunan manusia, baik disparitas capaian antar individu, antar gender, maupun antar wilayah. Disparitas capaian antarindividu tercermin dari indikator *Gini Ratio*. Pada September 2018, *Gini Ratio* pengeluaran Indonesia tercatat sebesar 0,384 dan merupakan nilai yang terendah selama periode 2011-2018. Sedangkan gini rasio lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 0,319

---

<sup>75</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia Tahun 2018”, <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.

pada tahun 2018 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,312.<sup>76</sup>

Di bidang ekonomi, banyak isu dan permasalahan strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Stabilitas moneter, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan daya saing dan produktivitas, peningkatan ekonomi kreatif akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Iklim perekonomian yang kondusif tentu akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan kompetitif serta meningkatkan pendapatan dan pengeluaran masyarakat.

Beberapa catatan dalam perkembangan perekonomian suatu negara yakni perekonomian yang ada di perkotaan masih sangat dominan daripada pedesaan. Sehingga ketimpangan ekonomi terlihat jelas di beberapa negara. Faktor-faktor yang terdampak dari ketimpangan tersebut yakni akses pendidikan dan kesehatan yang timpang pula. Jadi diperlukan upaya atau program dari pemerintah yang baik untuk pemeratakan perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.

Di Kabupaten Jember, tingkat perekonomian yang digambarkan dalam laporan terakhir BPS tahun 2018 memperlihatkan bahwa perekonomian Kabupaten Jember dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat

---

<sup>76</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia”, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2012) telah mencapai Rp 9,090 juta, meningkat Rp 392 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>77</sup> Artinya beberapa kebijakan pemerintah daerah berhasil memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jember.<sup>78</sup>

## B. Penyajian Data

### A. Perhitungan menggunakan metode lama

Perhitungan IPM dengan menggunakan metode lama dimulai pada awal diperkenalkan oleh UNDP sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Berikut perhitungan IPM menggunakan metode lama:

**Tabel 3.1**  
**Data IPM Metode Lama**

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>IPM</b>	57,66	58,1	60,7	60,9	61,72	63,04	63,27	63,71	63,27
<b>AHH</b>	59,45	59,9	60,9	61,1	61,73	62,1	62,33	62,47	62,66
<b>RLS</b>	5,45	5,5	5,4	5,42	5,55	6,29	6,29	6,29	6,45
<b>Melek Huruf</b>	77,18	77,9	78,36	79,13	80,55	82,84	82,84	82,84	83,08
<b>Pengeluaran Per Kapita</b>	581,32	585,7	607,84	609,83	610,56	611,36	612,62	617,34	621,9

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2009

<sup>77</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia”, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

<sup>78</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia Tahun 2018”, <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>.



Dari data tersebut menunjukkan nilai perhitungan IPM Kabupaten Jember yang menggunakan metode lama dari tahun 2001-2009.

#### B. Perhitungan menggunakan metode baru

Perhitungan IPM dengan menggunakan metode diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 2010 sebagai kelanjutan dari IPM yang lama karena ada beberapa hal yang dinilai tidak relevan untuk digunakan lagi. Berikut perhitungan IPM menggunakan metode baru:

**Tabel 3.2**  
**Data IPM Metode Baru**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>IPM</b>	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96	65,96
<b>AHH</b>	67,44	67,54	67,65	67,75	67,8	68,2	68,37	68,5	68,74
<b>RLS</b>	5,49	5,53	5,58	5,62	5,63	5,76	6,05	6,06	6,07
<b>HLS</b>	10,87	10,99	11,11	11,87	12	12,01	12,31	12,79	13,21
<b>Penege luaran Per Kapita</b>	7380,45	7732,07	8069,5	8198,14	8226,66	8225,28	8409	8698	9090

Sumber: BPS Jawa Timur Tahun 2010-2018

Dari data tersebut menunjukkan nilai perhitungan IPM Kabupaten Jember yang menggunakan metode baru dari tahun 2010-2018.

#### C. Analisis Data

##### A. Uji statistik

##### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel eksogen.

Semakin kecil nilai koefisien determinasi maka semakin terbatas kemampuan variabel endogen dalam menjelaskan variasi variabel eksogen. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin luas kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *R Adjusted R Square* pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**IPM Metode Lama**

*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.992 <sup>a</sup>	.984	.969	.39984	.984	1	.992 <sup>a</sup>	.984	.969

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan uji koefisien determinasi tabel diatas terkait dengan perhitungan IPM yang menggunakan metode lama, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,969. Hal ini berarti AHH, RLS dan pengeluaran per kapita memiliki hubungan determinasi sebesar 96,9%. Sedangkan sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini:

**Tabel 3.4**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**IPM Metode Baru**

*Model Summary<sup>b</sup>*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Square	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.999 <sup>a</sup>	.997	.995	.13672	.997	396.667	4	4	.000

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Sedangkan dalam perhitungan IPM yang menggunakan metode baru uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,995. Hal ini berarti AHH, RLS dan pengeluaran per kapita memiliki hubungan determinasi sebesar 99,5%. Sedangkan sisanya sebesar 1,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## 2. Uji F

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen secara simultan (bersama-sama). Berikut adalah hasil uji F menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)* versi 22.0:

**Tabel 3.5**

### Hasil Uji F IPM Metode Lama

#### ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	40.094	4	10.024	62.699	.001 <sup>b</sup>
	Residual	.639	4	.160		
	Total	40.734	8			

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan uji F pada perhitungan IPM yang menggunakan metode lama dapat nilai signifikansi sebesar 0,01 atau lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang artinya  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan variabel AHH, RLS, melek huruf dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan terhadap IPM di Kabupaten Jember periode 2001-2009.

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji F**  
**IPM Metode Baru**

#### ANOVA<sup>a</sup>

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29.660	4	7.415	396.667	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.075	4	.019		
	Total	29.735	8			

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Sedangkan untuk perhitungan IPM yang menggunakan metode baru dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihitung secara simultan yakni sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel AHH, RLS, HLS dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jember 2010-2018.

### 3. Uji T

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa signifikan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yang digunakan. Berikut ini hasil uji t (parsial) menggunakan SPSS versi 22.0:

**Tabel 3.7**  
**Hasil Uji T**  
**IPM Metode Lama**

*Coefficients<sup>a</sup>*

	Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-32.479	29.507		-1.101	.333
	AHH	-.059	2.088	-.030	-.028	.979
	RLS	-.853	1.367	-.174	-.624	.566
	Melek Huruf	.708	.775	.763	.914	.412
	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan	.075	.081	.456	.930	.405

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan uji t atas perhitungan IPM yang menggunakan metode lama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel AHH adalah 0,082 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,082 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel AHH terhadap IPM.
2. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel RLS adalah 0,566 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,566 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel RLS terhadap IPM.
3. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel melek huruf adalah 0,412 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,412 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel melek huruf terhadap IPM.
4. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah 0,405 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,405 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel pengeluaran per kapita terhadap IPM.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji T**  
**IPM Metode Baru**

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.182	34.435		.528	.625
AHH	.174	.589	.042	.295	.782
RLS	1.734	.838	.217	2.069	.107
HLS	1.146	.253	.480	4.530	.011
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan	.001	.000	.286	3.309	.030

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan uji t atas perhitungan IPM yang menggunakan metode baru dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel AHH adalah 0,782 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,782 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel AHH terhadap IPM.
2. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel RLS adalah 0,107 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,107 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel RLS terhadap IPM.

3. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel HLS adalah 0,011 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,011 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel HLS terhadap IPM.
4. Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah 0,030 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,030 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pendapatan yang disesuaikan terhadap IPM.

## B. Uji Komparasi

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji Kolmogorov-Smirnov dari IPM yang menggunakan perhitungan metode baru:



**Tabel 3.9**  
**Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov**  
**IPM Metode Baru**

*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21586346
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.098
	Negative	-.135
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas dapat diketahui bahwa nilai *Asymptotic sig* sebesar 0,20 atau lebih besar dari tingkat keyakinan atau taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian sebesar 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal maka uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji parametrik (*paired sample t-test*).

## 2. *Paired T-Test* (Uji T Sampel Berpasangan)

*Paired t-test* adalah uji parametrik yang digunakan untuk menguji sampel yang berkolerasi dengan jenis data interval/rasio.

Berikut adalah hasil dari *paired t-test* dari perhitungan IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru:

### a. IPM

Berikut adalah variabel IPM yang diolah menggunakan SPSS 22.0 sebelum dan sesudah menggunakan metode baru:

**Tabel 3.10**  
**Hasil Paired T Test**  
**IPM Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**

*Paired Samples Test*

	Paired Differences					t	D f	Sig. (2- tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair IPM Sebelum - IPM Sesudah	-1.33556	.90280	.30093	-2.02951	-.64160	- 4.438	8	.002

Sumber: Hasil data diolah dengan SPSS 22.0

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya ada perbedaan yang signifikan variabel IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

b. AHH

AHH adalah salah satu indikator dari faktor kesehatan dalam perhitungan IPM metode baru. Berikut data AHH yang diolah menggunakan SPSS versi 22.0:

**Tabel 3.11**  
**Hasil Paired T Test**  
**AHH Dalam IPM Metode Baru**

*Paired Samples Test*

	Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 AHH sebelum - AHH setelah	-6.59444	.74818	.24939	-7.16955	-6.01934	-26.442	8	.000

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan AHH terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya ada perbedaan yang signifikan AHH terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

c. RLS

RLS adalah salah satu indikator dari faktor pendidikan dalam perhitungan IPM metode baru. Berikut data RLS yang diolah menggunakan SPSS versi 22.0:

**Tabel 3.12**  
**Hasil *Paired T Test***  
**RLS Dalam IPM Metode Baru**

***Paired Samples Test***

		Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	RLS sebelum - RLS setelah	.09444	.25904	.08635	-.10467	.29356	1.094	8	.306

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan RLS terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,306 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan RLS terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

d. Melek Huruf

Melek huruf adalah salah satu indikator dari faktor pendidikan dalam perhitungan IPM sebelum dan sesudah metode baru. Berikut data melek huruf yang diolah menggunakan SPSS versi 22.0:

**Tabel 3.13**  
**Hasil Paired T Test**  
**Melek Huruf Dalam IPM**

*Paired Samples Test*

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Melek Huruf Sebelum - Melek Huruf Sesudah	-5.76000	1.40980	.46993	-6.84367	-4.67633	-12.257	8	.000

Sumber: Hasil diolah oleh SPSS 22.0

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan melek huruf terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya ada perbedaan yang signifikan variabel melek huruf terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

e. Variabel HLS

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPS Kabupaten Jember menyatakan bahwa “perubahan metode perhitungan IPM memang tidak dilakukan perhitungan mundur sampai sebelum tahun 2010, sehingga HLS sebelum tahun 2010 tidak dihitung, hal tersebut berkaitan dengan beberapa hal. Data HLS diambil dari SUSENAS proyeksi penduduk antara sebelum dan sesudah tahun 2010.” Sehingga dapat diartikan

bahwa ketidaksediaan data HLS sebelum tahun 2010 dikarenakan BPS tidak melakukan perhitungan terhadap data tersebut.

f. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator dari faktor kemiskinan dalam perhitungan IPM metode baru. Berikut data pengeluaran per kapita yang diolah menggunakan SPSS versi 22.0:

**Tabel 3.14**  
**Hasil *Paired T Test***  
**Pengeluaran yang Disesuaikan Dalam IPM Metode Baru**

*Paired Samples Test*

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Pengeluaran per kapita sebelum – Pengeluaran per kapita setelah	-7618.95889	485.65192	161.88397	-7992.26400	-7245.65378	-47.064	8	.000

Sumber: Hasil data diolah SPSS versi 22.0

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan pengeluaran per kapita terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya ada perbedaan yang

signifikan faktor kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru.

## D. Pembahasan

### A. Analisis Variabel Dalam Uji T

#### 1. Uji t pada IPM Metode Lama

##### a. Variabel AHH

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan variabel AHH adalah 0,979 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,979 > 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara AHH terhadap IPM di Kabupaten Jember.” Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kesehatan daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variable AHH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi AHH maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa tidak

ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap IPM di Lampung.<sup>79</sup>

b. Variabel RLS

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel RLS adalah 0.566 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0.566 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel RLS terhadap IPM. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel RLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan pendidikan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riva Ubar Harahap yang menyatakan bahwa

---

<sup>79</sup> Syamsul Arifin, "Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 90.



tidak ada pengaruh signifikan DAK bidang pendidikan terhadap IPM.<sup>80</sup>

c. Variabel Melek Huruf

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel melek huruf adalah 0.412 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0.421 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel melek huruf terhadap IPM. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel melek huruf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi melek huruf maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan pendidikan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki dengan meningkatkan kualitas dan minat baca masyarakatnya.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa tidak

---

<sup>80</sup> Riva Ubar Harahap, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11 (Maret, 2011), 1.

ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di Lampung.<sup>81</sup>

d. Variabel Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel PPP adalah 0.405 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0.405 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel PPP terhadap IPM. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel PPP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi PPP maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin tinggi tingkat perekonomian masyarakat.

2. Uji t pada IPM Metode Baru

a. Variabel AHH

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel AHH adalah 0,782 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0,782 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga

<sup>81</sup> Syamsul Arifin, "Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 90.

dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel AHH terhadap IPM. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel AHH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi AHH maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan kesehatan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Hastuti yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM.<sup>82</sup>

#### b. Variabel RLS

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel RLS adalah 0.107 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0,107 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel RLS terhadap IPM. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

---

<sup>82</sup> Wulan Hastuti, "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap IPM Tahun 1992-2011", (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2013), 85.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel RLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan pendidikan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di Lampung.<sup>83</sup>

#### c. Variabel HLS

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel HLS adalah 0,011 lebih besar dari nilai taraf signifikansi sebesar 0.05 ( $0,011 > 0.05$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel HLS terhadap IPM Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variabel HLS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi HLS maka semakin tinggi pula

---

<sup>83</sup> Syamsul Arifin, "Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, (2017), 90.

nilai IPM. Artinya semakin tinggi pelayanan pendidikan bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsul Arifin yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap IPM di Lampung.<sup>84</sup>

d. Variabel Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan uji t pada Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Nilai signifikansi yang dihasilkan variabel pendapatan yang disesuaikan adalah 0,030 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,008 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pendapatan yang disesuaikan terhadap IPM. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kebijakan yang cukup efektif dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat.

Berdasarkan teori yang relevan mengatakan bahwa variable pendapatan yang disesuaikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Karena semakin tinggi pendapatan yang disesuaikan maka semakin tinggi pula nilai

---

<sup>84</sup> Riva Ubar Harahap, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 11 (Maret, 2011), 1.

IPM. Artinya semakin tinggi perekonomian bagi masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM yang dimiliki.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita Dewi yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Riau.<sup>85</sup>

## **B. Analisis Variabel Dalam Uji F**

### **1. Uji F pada IPM Metode Lama**

Berdasarkan uji F pada Tabel 3.5 perhitungan IPM dengan metode lama dapat nilai signifikansi sebesar 0,01 atau lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang artinya  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan secara simultan variabel AHH, RLS, melek huruf dan PPP terhadap IPM di Kabupaten Jember periode 2001-2009. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kebijakan yang cukup efektif dalam meningkatkan kualitas masyarakat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christina Usmaladianti yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel kemiskinan, pengeluaran

---

<sup>85</sup> Novita Dewi, "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM di Provinsi Riau", *JOM Fekon*, 1 (Februari, 2017), 1.

pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah<sup>86</sup>.

Hasil tersebut juga sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang memiliki cakupan sangat luas bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi semata, namun lebih pada hal-hal yang mencakup struktur sosial yang harus diperbaiki sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>87</sup>

## 2. Uji F pada IPM Metode Baru

Sedangkan untuk perhitungan IPM yang menggunakan metode baru pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihitung secara simultan yakni sebesar 0.001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa variabel AHH, RLS, HLS dan Pendapatan yang disesuaikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jember 2010-2018.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christina Usmaladianti yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel kemiskinan, pengeluaran

<sup>86</sup> Christina Usmaladianti, "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009", (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011),19.

<sup>87</sup> Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, terj. Agus Dharma (Jakarta, Erlangga), 27.

pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah<sup>88</sup>.

Hasil tersebut juga sesuai dengan teori yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang memiliki cakupan sangat luas bukan hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi semata, namun lebih pada hal-hal yang mencakup struktur social yang harus diperbaiki sehingga dapat mengurangi kesenjangan social yang terjadi di masyarakat.<sup>89</sup>

### C. Analisis Variabel Dalam Uji Beda

#### 1. Variabel IPM

Berdasarkan *paired t test* pada Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa perbedaan IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,02 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Jember.

<sup>88</sup> Christina Usmaladianti, “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011),19.

<sup>89</sup> Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, terj. Agus Dharma (Jakarta, Erlangga), 27.



Penelitian ini mendukung dari laporan tahunan BPS yang menyatakan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Jember selalu meningkat pada setiap tahunnya.<sup>90</sup> Namun hal ini bukan berarti bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah sudah selesai. Kabupaten Jember masih tertinggal jauh dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut terjadi karena pembangunan manusia di Kabupaten Jember masih di bawah dengan kabupaten/kota lainnya.

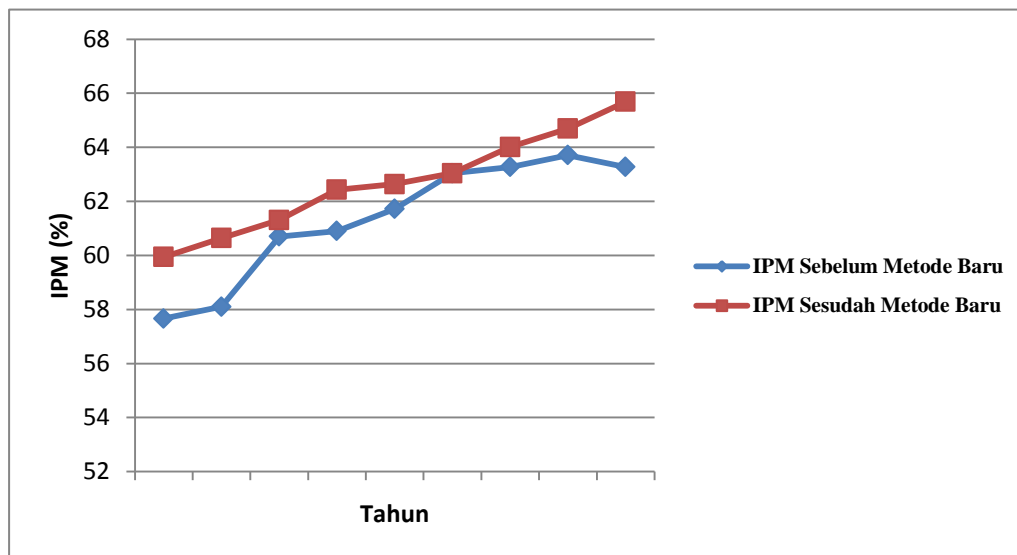
Beberapa program kerja dari pemerintah daerah yang mampu meningkatkan pembangunan manusia, antara lain tujuan program kerja pemerintah daerah yang fokus pada pembangunan sumberdaya manusianya.

Berikut adalah tren naik IPM Kabupaten Jember sebelum dan sesudah dengan metode baru yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

---

<sup>90</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2019/10/21/150/indeks-pembangunan-manusia-ipm--kabupaten-jember-tahun-2018.html>

**Gambar 3.1**  
**IPM Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Jember baik sebelum dan sesudah menggunakan metode baru selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Artinya program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia cukup berhasil.

## 2. Variabel AHH

Berdasarkan *paired t test* pada Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa perbedaan AHH terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan faktor kesehatan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan

metode baru. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam mengurangi tingkat kesenjangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat daerah dalam setiap tahunnya.

Penelitian ini mendukung dari laporan tahunan BPS yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jember setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Artinya pemerintah daerah berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dilihat dari AHH seorang bayi yang baru lahir.<sup>91</sup>

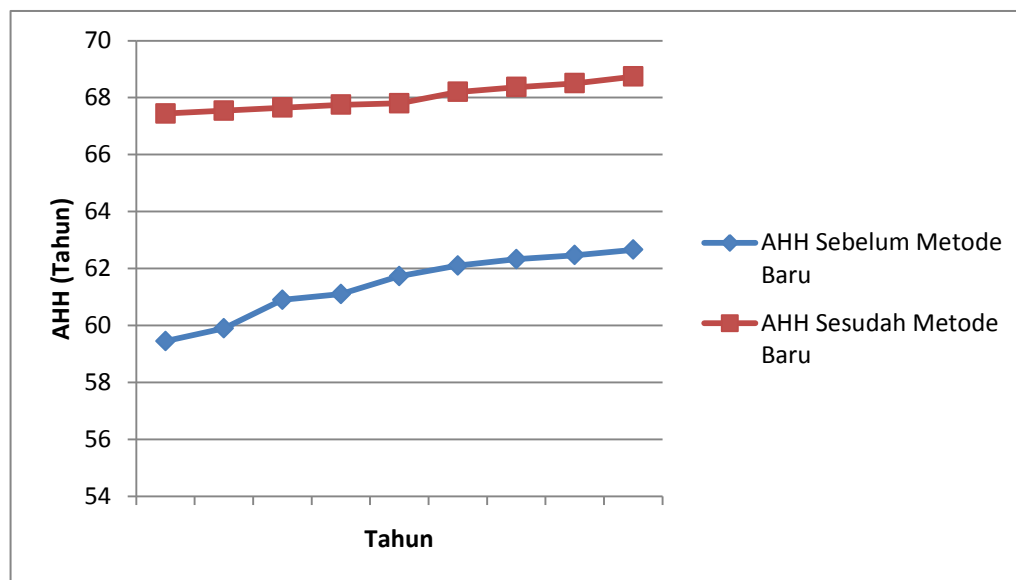
Beberapa program kerja dari pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kualitas layak hidup. Hal ini dinilai mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Berikut adalah tren naik variabel AHH sebagai variabel pembentuk IPM sebelum dan sesudah dengan metode baru yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

---

<sup>91</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2019/10/21/150/indeks-pembangunan-manusia-ipm--kabupaten-jember-tahun-2018.html>

**Gambar 3.2**  
**AHH Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa AHH sebagai salah satu pembentuk IPM menunjukkan tren meningkat, baik sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhasil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya.

### 3. Variabel RLS

Berdasarkan *paired t test* pada Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa perbedaan RLS terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,306 lebih besar dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan faktor pendidikan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan

metode baru. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat daerah dalam setiap tahunnya. Diperlukan beberapa terobosan kebijakan untuk mendorong masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya pendidikan.

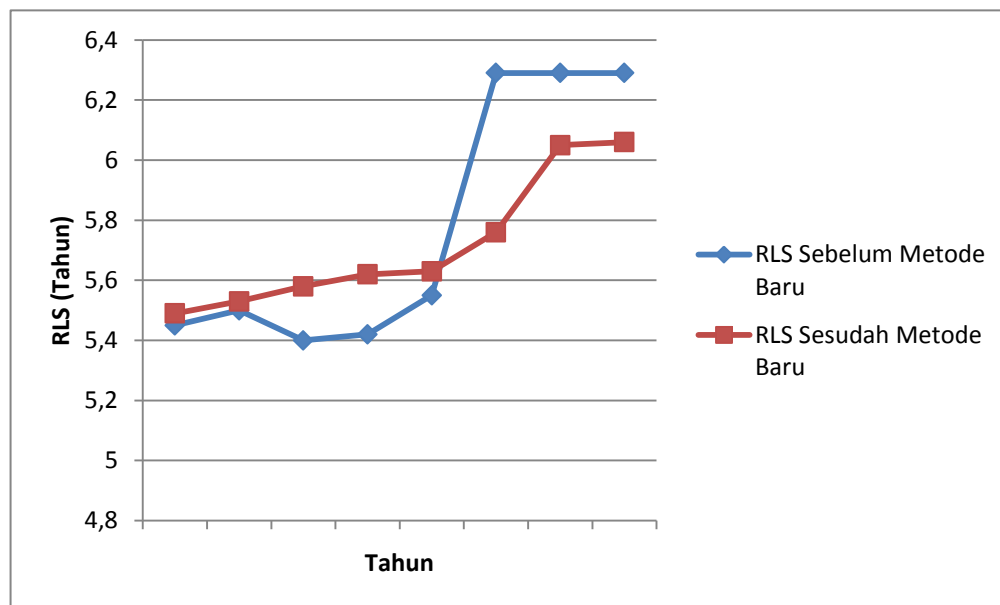
Penelitian ini mendukung dari laporan tahunan BPS yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran akan pendidikan dan jenjang sekolah yang ditempuh di Kabupaten Jember setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan namun tidak signifikan.<sup>92</sup> Artinya pemerintah daerah kurang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya suatu pendidikan sebagai gambaran kesuksesan suatu pemerintah meningkatkan pendidikan masyarakatnya sehingga SDM yang dimiliki menjadi unggul dan mampu bersaing.

Berikut adalah tren variabel RLS sebagai variabel pembentuk IPM sebelum dan sesudah dengan metode baru yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

---

<sup>92</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2019/10/21/150/indeks-pembangunan-manusia-ipm--kabupaten-jember-tahun-2018.html>

**Gambar 3.3**  
**RLS Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa RLS sebagai salah satu pembentuk IPM menunjukkan tren yang kurang stabil pada RLS sebelum dengan metode baru. Namun RLS sesudah metode baru selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Secara menyeluruh dapat dilihat bahwa RLS sebelum metode baru angkanya lebih besar dari RLS metode lama. Artinya program pemerintah daerah yang terkait pendidikan kurang begitu maksimal. Hal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah supaya memberikan program kerja yang tepat di sektor pendidikan.

#### 4. Variabel Melek Huruf

Berdasarkan *paired t test* pada Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa perbedaan melek huruf terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test* menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,00 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada perbedaan yang signifikan faktor pendidikan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat daerah dalam setiap tahunnya terutama dalam bidang baca tulis. Namun masih diperlukan beberapa terobosan kebijakan lagi untuk mendorong minat baca masyarakat dalam menyadari betapa pentingnya pendidikan.

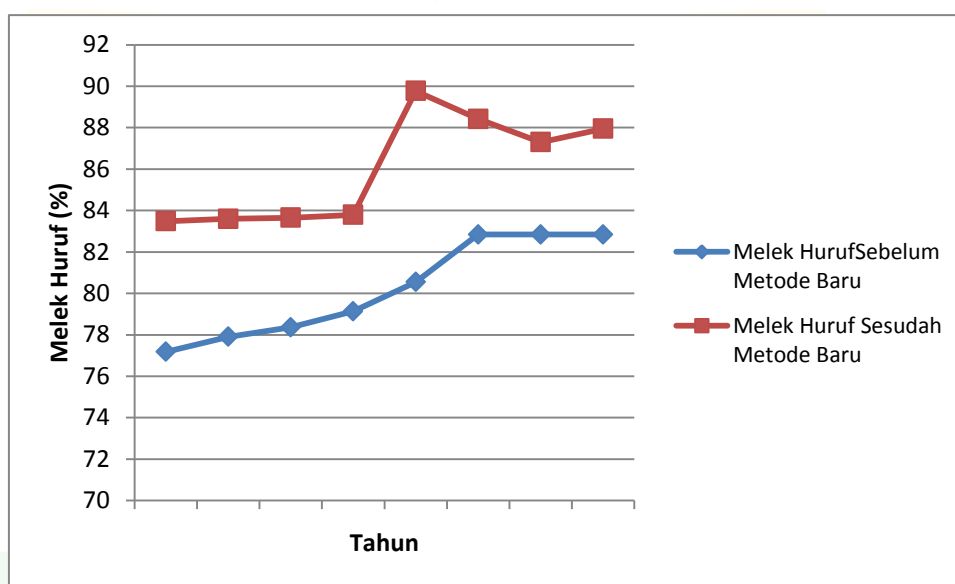
Penelitian ini didukung oleh laporan tahunan BPS yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran akan minat baca masyarakat di Kabupaten Jember setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.<sup>93</sup> Artinya pemerintah daerah cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya suatu pendidikan sebagai gambaran kesuksesan suatu pemerintah meningkatkan pendidikan masyarakatnya sehingga SDM yang dimiliki menjadi unggul dan mampu bersaing.

---

<sup>93</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2019/10/21/150/indeks-pembangunan-manusia-ipm--kabupaten-jember-tahun-2018.html>

Berikut adalah tren variabel melek huruf sebagai variabel pembentuk IPM sebelum dan sesudah dengan metode baru yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

**Gambar 3.4**  
**Melek Huruf Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa melek huruf sebagai salah satu pembentuk IPM menunjukkan tren meningkat, baik sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup berhasil dalam memberikan kualitas pendidikan yang baik kepada masyarakatnya.

##### 5. Variabel Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan *paired t test* pada tabel 3.14 dapat diketahui bahwa perbedaan pengeluaran per kapita terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada hasil *paired t-test*



menunjukkan nilai probabilitas (*sig*) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar  $0,05/2=0,025$ . Artinya ada perbedaan yang signifikan faktor kemiskinan terhadap IPM sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Dengan hasil tersebut berarti bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat daerah dalam setiap tahunnya.

Penelitian ini mendukung dari laporan tahunan BPS yang menyatakan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Jember setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.<sup>94</sup> Artinya pemerintah daerah berhasil dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Kabupaten Jember. Namun peningkatan terhadap sektor ekonomi harus selalu ditingkatkan di setiap tahunnya dikarenakan IPM Kabupaten Jember masih berada di urutan ke-31 kabupaten/kota di Jawa Timur.

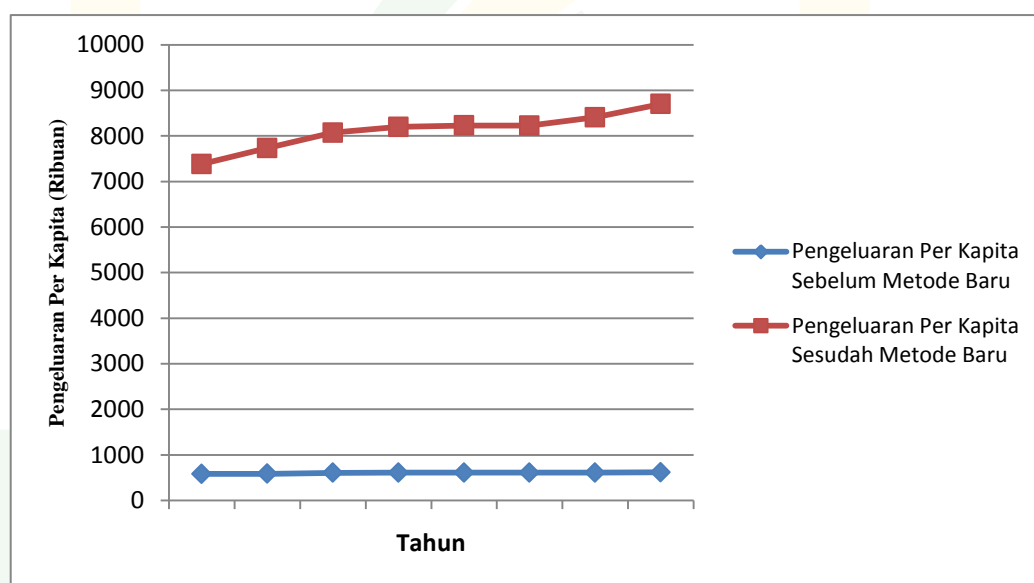
Beberapa program kerja pemerintah daerah yang mendukung dalam mengentaskan kemiskinan yakni salah satunya program pemberian beras bagi keluarga yang belum mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah pusat, bantuan pemberdayaan UMKM dan bantuan lainnya. Hal tersebut dinilai cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat dari tahun ke tahun.

---

<sup>94</sup> BPS, “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jember Tahun 2018”, <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2019/10/21/150/indeks-pembangunan-manusia--ipm--kabupaten-jember-tahun-2018.html>

Berikut adalah tren variabel PPP/Pendapatan yang disesuaikan sebagai variabel pembentuk IPM sebelum dan sesudah dengan metode baru yang ditunjukkan pada gambar berikut ini:

**Gambar 3.5**  
**Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan**  
**Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**



Sumber: BPS Kabupaten Jember

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Selain perbedaan yang signifikan tren kenaikan terjadi terus-menerus setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait kemiskinan dinilai cukup efektif.

## 6. Variabel HLS

Variabel HLS tidak dapat dihitung menggunakan paired t test dikarenakan ketidaksediaan data. Hal tersebut terjadi karena BPS tidak menghitung sebelum tahun 2010. HLS masuk dalam perhitungan IPM setelah tahun 2010.

Variabel HLS sebagai pengganti dinilai lebih layak dikarenakan dari HLS dapat diperoleh gambaran yang relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak ditutupi oleh capaian dimensi yang lain. Selain itu variabel HLS hanya dipergunakan dalam mengukur IPM dan tidak digunakan dalam menghitung yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uji  $f$  dalam metode lama dapat diketahui bahwa pengaruh faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM menunjukkan nilai probabilitas ( $sig$ ) sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM. Sedangkan dalam metode baru dapat diketahui bahwa pengaruh faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM menunjukkan nilai probabilitas ( $sig$ ) sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM.
2. Berdasarkan uji  $t$  dalam metode lama dapat diketahui bahwa faktor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap IPM. Sedangkan dalam metode baru menunjukkan bahwa variabel AHH dan RLS tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Adapun variabel HLS dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan berpengaruh signifikan terhadap IPM.
3. Berdasarkan *paired t-test* dapat diketahui bahwa variabel IPM, AHH, melek huruf dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru menunjukkan perbedaan yang

signifikan. Sedangkan variabel RLS sebelum dan sesudah menggunakan metode baru menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Adapun variabel HLS tidak dapat dihitung dikarenakan data tidak tersedia.

## **B. Saran**

Penelitian menjadikan gambaran bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengambil langkah kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan mampu bersaing. Terutama di sektor pendidikan yang dinilai masih belum cukup mengalami peningkatan yang signifikan sehingga perlu ada formulasi kebijakan yang efektif untuk terus menggenjot kualitas pendidikan karena mengingat Kabupaten Jember sebagai salah satu kota yang dijuluki sebagai kota pendidikan.

Di dalam bidang kesehatan, Kabupaten Jember dinilai cukup baik dalam segi pelayanan maupun kualitas kesehatan sehingga hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat untuk menekan angka kematian khususnya untuk bayi.

Kemiskinan di Kabupaten Jember yang dilihat dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakatnya dinilai cukup baik. Sehingga ke depannya pemerintah daerah berusaha agar terus berusaha dalam mempertahankan dan terus berupaya untuk meningkatkan, sehingga dapat menekan angka kemiskinan masyarakat Kabupaten Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bank, World. 1991 “*World Development Report 1991: The Challenge of Development*”. <http://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5974>.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- BPS. 2014. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, <http://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>. Jakarta: BPS.
- BPS. 2015. “Indeks Pembangunan Manusia”. <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>. Jakarta: BPS.
- BPS. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2017*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2018*. Jakarta: BPS.
- BPS. 2018. “Indeks Pembangunan Manusia Republik Indonesia Tahun 2018”. <https://www.bps.go.id/publication/2019/08/27/34432798c6ae95c6751bfbba/indeks-pembangunan-manusia-2018.html>. Jakarta: BPS.
- BPS. 2018. “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2018”. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/2018/08/23/ed0fddee041f0944344af43b/kabupaten-jember-dalam-angka-2018.html>. Jember: BPS.
- BPS. t.t. “Data Pembangunan Nasional”. <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>. Jakarta: BPS.
- BPS. t.t. “Indeks Pembangunan Manusia”. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>. Jakarta: BPS.
- BPS. t.t. ”Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. <http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> . Jakarta: BPS.
- Hakim, Abdul. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Huda, Nurul. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Indiantoro, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Jhingan, M. L. 2018. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Penyusun, Tim. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Riduwan, Sunarto. 2015. *Pengantar Statistika Pendidikan, Sosial, Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siregar, Syofian. 2017. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alvabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alvabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alvabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alvabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Mustafidah. 2012. *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Bandung: CV Alvabeta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: Economic Development.
- Wiratna, Sujarweni. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 2

#### Data Penelitian

#### Data IPM Metode Lama

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>IPM</b>	57,66	58,1	60,7	60,9	61,72	63,04	63,27	63,71	63,27
<b>AHH</b>	59,45	59,9	60,9	61,1	61,73	62,1	62,33	62,47	62,66
<b>RLS</b>	5,45	5,5	5,4	5,42	5,55	6,29	6,29	6,29	6,45
<b>Melek Huruf</b>	77,18	77,9	78,36	79,13	80,55	82,84	82,84	82,84	83,08
<b>Pengeluaran Per Kapita</b>	581,32	585,7	607,84	609,83	610,56	611,36	612,62	617,34	621,9

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2009

#### Data IPM Metode Baru

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>IPM</b>	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04	64,01	64,96	65,96
<b>AHH</b>	67,44	67,54	67,65	67,75	67,8	68,2	68,37	68,5	68,74
<b>RLS</b>	5,49	5,53	5,58	5,62	5,63	5,76	6,05	6,06	6,07
<b>HLS</b>	10,87	10,99	11,11	11,87	12	12,01	12,31	12,79	13,21
<b>Pengeluaran Per Kapita</b>	7380,45	7732,07	8069,5	8198,14	8226,66	8225,28	8409	8698	9090



### Lampiran 3

#### Data Output SPSS

#### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) IPM Metode Lama

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.992 <sup>a</sup>	.984	.969	.39984	.984	1	.992 <sup>a</sup>	.984	.969

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

#### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) IPM Metode Baru

#### Hasil Uji F

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Square	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.999 <sup>a</sup>	.997	.995	.13672	.997	396.667	4	4	.000

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

#### IPM Metode Lama

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	40.094	4	10.024	62.699	.001 <sup>b</sup>
Residual	.639	4	.160		
Total	40.734	8			

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

## Hasil Uji F IPM Metode Baru

### ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	29.660	4	7.415	396.667	.000 <sup>b</sup>
Residual	.075	4	.019		
Total	29.735	8			

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

## Hasil Uji T IPM Metode Lama

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-32.479	29.507		-1.101	.333
AHH	-.059	2.088	-.030	-.028	.979
RLS	-.853	1.367	-.174	-.624	.566
Melek Huruf	.708	.775	.763	.914	.412
Pengeluaran per Kapita	.075	.081	.456	.930	.405

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

## Hasil Uji T IPM Metode Baru

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.182	34.435		.528	.625
AHH	.174	.589	.042	.295	.782
RLS	1.734	.838	.217	2.069	.107
HLS	1.146	.253	.480	4.530	.011
Pengeluaran per Kapita	.001	.000	.286	3.309	.030

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

**Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov  
IPM Metode Baru**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.21586346
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.098
	Negative	-.135
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

**Hasil Uji Paired T Test  
IPM Sebelum dan Sesudah Dengan Metode Baru**

*Paired Samples Test*

	Paired Differences	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		T	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
					Pair 1	IPM Sebelum - IPM Sesudah			

Sumber: hasil data diolah dengan SPSS 22.0

**Hasil Uji Paired T Test  
AHH Dalam IPM Metode Baru**

*Paired Samples Test*

	Paired Differences	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		T	Df	Sig. (2-tailed)
					Lower	Upper			
					Pair 1	AHH sebelum - AHH setelah			

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

**Hasil Uji Paired T Test  
RLS Dalam IPM Metode Baru**

*Paired Samples Test*

		Paired Differences					T	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	RLS sebelum - RLS setelah	.09444	.25904	.08635	-.10467	.29356	1.094	8	.306

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

**Hasil Uji Paired T Test  
Melek Huruf Dalam IPM**

*Paired Samples Test*

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Melek Huruf Sebelum - Melek Huruf Sesudah	-5.76000	1.40980	.46993	-6.84367	-4.67633	-12.257	8	.000

Sumber: hasil diolah oleh SPSS 22.0

**Hasil Uji Paired T Test  
Pengeluaran per kapita yang Disesuaikan Dalam IPM Metode Baru**

*Paired Samples Test*

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pengeluaran per kapita sebelum - Pengeluaran per kapita setelah	-7618.95889	485.65192	161.88397	-7992.26400	-7245.65378	-47.064	8	.000

Sumber: hasil data diolah SPSS versi 22.0

**Lampiran 4**  
**Jurnal Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>
1.	20 Mei 2019	Penyerahan Surat Ijin Penelitian ke BPS Kabupaten Jember
2.	2 Juni 2019	Proses Penelitian
3.	7 Juli 2019	Proses Penelitian
4.	10 Agustus 2019	Proses Penelitian
5.	20 Nopember 2019	Pengambilan Surat Keterangan Selesai Penelitian

Mahasiswa

Mohammad Zyainullah  
E20152077

IAIN JEMBER



Lampiran 6

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Zyainullah  
NIM : E20152077  
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 Nopember 2019  
Saya yang menyatakan



Mohammad Zyainullah  
E20152077





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/11 /2019  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

**Yth. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember**

di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Mohammad Zyainullah  
NIM : E20152077  
Semester : IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah  
No. Telpn : 085746657061  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Kha'runnisa Musari, M. MT.  
NIP : 197810032015032001  
Judul Penelitian : Analisis Komparasi Faktor Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Sebelum dan Sesudah Menggunakan Metode Baru

Demikian surat permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jember, 14 Nopember 2019  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I**  
NIP. 19730830 199903 1 002





**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN JEMBER**

Kepada Yang Terhormat:  
Kepala IAIN  
di  
Jember

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
No. B-3509.194/BPS/9286/11/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Iswardi, SE  
Jabatan : Kasub. Bagian Tata Usaha  
Unit Kerja : BPS Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Mohammad Zyainullah  
NIM : E20152077  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah  
Institit : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Komparasi Faktor Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Sebelum dan Sesudah Menggunakan Metode Baru".

Dengan demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Nopember 2019



## Lampiran 7

### Biodata Penulis



Nama : Mohammad Zyainullah  
NIM : E20152077  
Alamat : Jl. Manyar No.56 Slawu, Patrang, Jember.  
Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : IAIN Jember  
Riwayat Pendidikan :

1. TK. Al-Qodiri 1 Jember
2. SDN Gebang 03 Jember
3. MTs. Al-Qodiri 1 Jember
4. SMK Al-Qodiri 1 Jember
5. IAIN Jember